

RENCANA KERJA

2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkan Rencana Strategis Dinkominfo Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



GOTRI WULANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Disusun Oleh:

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



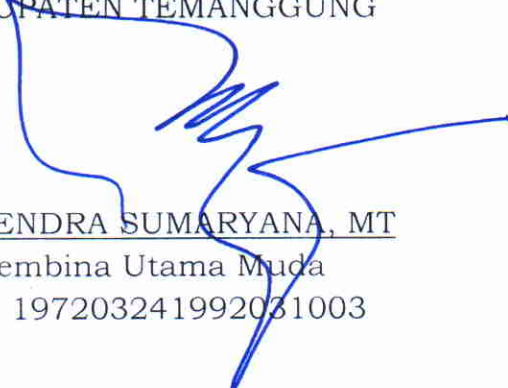
Ewiek Khavida, S.STP, MM
NIP. 198311182002122001

Petugas Verifikator



Aziz Sugiharto, S.AP
NIP. 197810041997031001

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2024	12
dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan	104
Fungsi Dinkominfo	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	105
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	111
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	111
2.7 Penghargaan	114
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	116
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	116
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinkominfo	118
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	124
4.1 Program dan Kegiatan	124
BAB V. PENUTUP	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2024
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo s.d Triwulan II Tahun 2025
Tabel 2.3	: Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2025 Dinkominfo Kabupaten Temanggung
Tabel 2.4	: Pendapatan Per Kapita Kab. Temanggung Tahun 2021-2025
Tabel 2.5	: Angka Kemiskinan Tahun 2021-2025
Tabel 2.6	: Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025
Tabel 2.7	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Temanggung dari Tahun 2021-2025
Tabel 2.8	: Predikat Indeks SPBE
Tabel 2.9	: Indeks SPBE Kabupaten Tahun 2021-2025
Tabel 2.10	: Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024
Tabel 2.11	: Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025
Tabel 2.12	: Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo yang aktif Tahun 2025 s/d Triwulan II
Tabel 2.13	: Daftar Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo
Tabel 2.14	: Lembaga Penyiaran Kabupaten Temanggung
Tabel 2.15	: Daftar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Temanggung
Tabel 2.16	: Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2025
Tabel 2.17	: Konten Diseminasi Informasi Media dan kanal Komunikasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2025
Tabel 2.18	: Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo
Tabel 2.19	: Rekapitulasi Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan Masyarakat s.d. Triwulan II Tahun 2025
Tabel 2.20	: Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang baik di Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan II Tahun 2025
Tabel 2.21	: Data Jumlah OPD yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Kabupaten Temanggung

- Tabel 2.22 : Data Kantor/Badan/Dinas yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2025
- Tabel 2.23 : Data Kecamatan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Tahun 2025
- Tabel 2.24 : Data Kelurahan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari Dinkominfo Tahun 2025
- Tabel 2.25 : Persentase Layanan Publik Secara Elektronik Kabupaten Temanggung sd. Triwulan II Tahun 2025
- Tabel 2.26 : Daftar Layanan Publik Yang Ditetapkan
- Tabel 2.27 : Daftar Layanan Publik Secara Elektronik
- Tabel 2.28 : Ketersediaan Data Statistik Sektor s.d. Triwulan II Tahun 2025
- Tabel 2.29 : Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2025
- Tabel 2.30 : Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi
- Tabel 2.31 : Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah
- Tabel 2.32 : Aplikasi yang sudah dilakukan Vulnerability Assesment (VA) Tahun 2024
- Tabel 2.33 : *Review* terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
- Tabel 2.34 : Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2025
- Tabel 2.35 : Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025
- Tabel 3.1 : Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2026
- Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2026
- Tabel 4.1 : Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2026
- Tabel 4.2 : Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2026

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan
- Gambar 2.1 : Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
- Gambar 2.2 : Berita PPID Pemkab Temanggung Berhasil Raih Kategori Informatif Tahun 2024
- Gambar 2.3 : Grafik koneksi internet di OPD
- Gambar 2.4 : Grafik koneksi internet di Kecamatan
- Gambar 2.5 : Grafik koneksi internet di Kelurahan
- Gambar 2.6 : Alur Layanan ITSA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

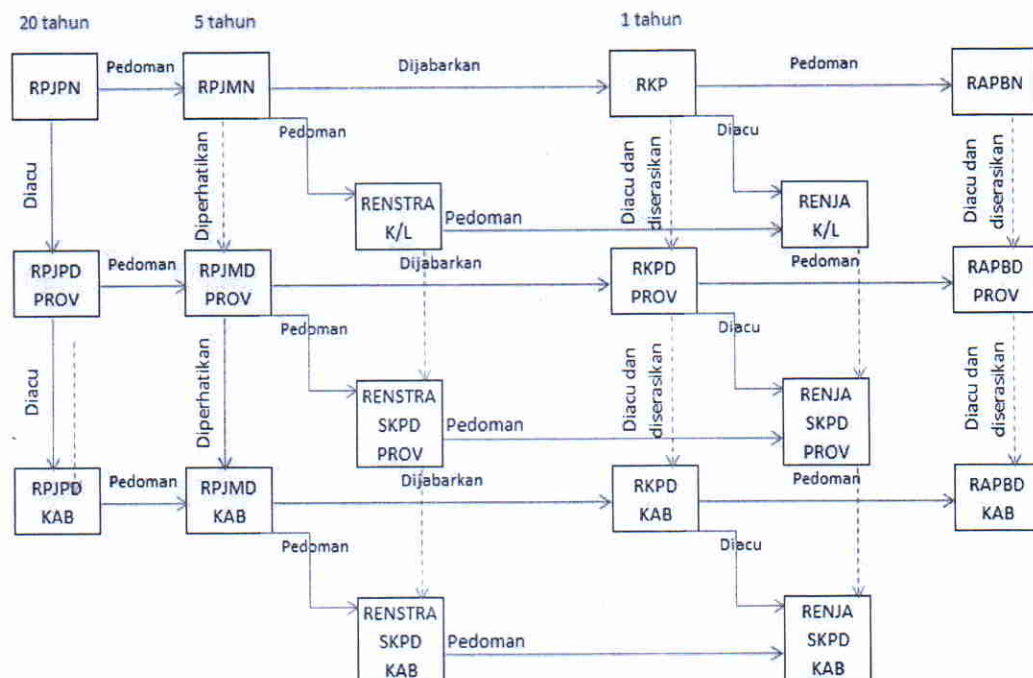
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinkominfo Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinkominfo Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinkominfo Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinkominfo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinkominfo, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinkominfo;
- 2) Kondisi pelayanan Dinkominfo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinkominfo;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinkominfo;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinkominfo.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinkominfo;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinkominfo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinkominfo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinkominfo untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dan realisasi tahun 2025 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinkominfo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun lalu berdasarkan renstra Dinkominfo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinkominfo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinkominfo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinkominfo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinkominfo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinkominfo;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinkominfo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkominfo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinkominfo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinkominfo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinkominfo;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinkominfo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Developmnet Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinkominfo;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinkominfo.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinkominfo.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinkominfo.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinkominfo;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinkominfo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinkominfo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinkominfo dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinkominfo dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinkominfo yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinkominfo untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinkominfo Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinkominfo Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinkominfo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKOMINFO

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinkominfo sampai dengan tahun lalu yaitu Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinkominfo 2025-2029 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo Tahun 2024

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI 2024			CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
	BELANJA DAERAH				43.405.914.029		9.933.027.343	10.521.827.691		1.996.135.824		96,72			
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				17.736.837.979		3.784.225.483	4.879.655.466		4.763.275.309		97,61			
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	%	100		100			100		100				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.689.802.459		3.456.618.083	3.971.117.366		3.888.781.910		97,93			
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Oran g/Bul an	70	5.689.802.459	33	3.456.618.083	3.971.117.366	33	3.888.781.910	100	97,93			DAU
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tunjangan ASN			664.400.000		242.500.000	600.000.000		596.130.489		99,36			
2.16.01.2.02.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Oran g/Bul an	70	664.400.000	5000	242.500.000	600.000.000	5.020	596.130.489	100	99,36			DBHC HT
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peraturan Perundang-Undangan			619.709.620		138.958.500	119.940.000		119.045.850		99,25			

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU SATA AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	45.659.800	5	5.000.000	4.995.500	5	4.995.500	100	100,00	DAU
2.16.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	60	54.386.560	3	46.498.000	27.500.000	3	27.250.000	100	99,09	DAU
2.16.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	60	68.883.660	12	16.000.000	16.001.000	12	15.797.000	100	100	DAU
2.16.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	60	49.495.600	12	9.500.000	9.500.000	12	9.356.850	100	98,49	DAU
2.16.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lapor an	60	130.818.000	12	27.982.000	27.982.000	12	27.960.000	100	99,92	DAU
2.16.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapor an	60	270.466.000	36	33.978.500	33.961.500	36	33.686.500	100	99,19	DAU
2.16.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			474.732.200		120.648.900	120.604.100		93.064.864		77,17	
2.16.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jas Surat menyurat	lapor an	60	10.060.000	36	3.150.000	3.150.000	36	2.135.000	100	67,78	DAU

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU SATA AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	48.642.000	12	7.000.000	7.000.000	12	5.826.060	100	83,23	DAU
2.16.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	70.285.800	24	11.500.000	11.457.200	24	11.440.000	100	99,85	DAU
2.16.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	345.744.400	12	98.998.900	98.996.900	12	73.663.804	100	74,41	DAU
2.16.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				288.193.700		68.000.000	67.994.000		66.252.196		97,44	
2.16.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	288.193.700	12	68.000.000	67.994.000	12	66.252.196	100	97,44	DAU

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				10.781.828.850			4.035.570.500	3.393.331.100		3.208.142.544			
		Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	45		35				85,29		100		
		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100		100				140,96		100		
		Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	100		85				100		100		
2.16.02. 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				10.781.828.850			4.035.570.500	3.393.331.100		3.208.142.544		94,54	
2.16.02. 2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	dok	60	9.099.136.650	12	12	3.506.363.500	3.134.444.300	12	2.958.491.459	100	94,39	DAU

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
2.16.02. 2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dok	60	640.308.400	12	153.148.000	83.148.000	12	78.010.006	100	93,82	DAU
2.16.02. 2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	9	454.831.800	40	376.059.000	175.738.800	40	171.641.079	100	97,67	DAU
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				13.302.467.000		1.915.398.360	2.033.508.625		1.996.135.824		98,16	
		Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	100		100			100		100		
		Persentase layanan publik secara elektronik	%	60		50			50,38		100		
2.16.03. 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8.723.694.100		1.514.661.860	1.714.661.325		1.706.941.453		99,55	
2.16.03. 2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	unit	1	8.723.694.100	12	1.482.662.360	1.682.661.825	12	1.674.993.453	100	99,54	DAU

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.03. 2.02	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.578.772.900		400.736.500	318.847.300		289.194.371		90,70	
2.16.03. 2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	60	1.417.844.400	1	119.322.300	75.716.000	1	66.958.319	100	88,43	DAU
2.16.03. 2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	462	1.175.464.500	15	79.622.800	79.077.500	17	72.303.500	100	91,43	DAU
2.16.03. 2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementa sikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	dok	60	1.257.725.500	12	201.791.400	164.053.800	12	149.932.552	100	91,39	DAU
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL				1.385.711.900		127.833.000	102.832.500		98.338.777		95,63	
		Ketersediaan data statistik sektoral	%	74, 01		73,93			100		100		
2.20.02. 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				1.385.711.900		127.833.000	102.832.500		98.338.777		95,63	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU SARAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20.02. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok.	3	1.118.056.400	3	100.000.000	75.000.000	3	71.565.550	100	95,42	DAU
2.20.02. 2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok.	1	267.655.500	2	27.833.000	27.832.500	2	26.773.227	100	96,19	DAU
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				199.068.300		70.000.000	112.500.000		110.569.037		98,28	
		Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	100		33,30			87,67		100		
		Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	100		30,00			113,3		100		
2.21.02. 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				199.068.300		70.000.000	112.500.000		110.569.037		98,28	

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN 2024		KET
				K	Rp.	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.21.02. 2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	26	199.068.300	12	50.000.000	30.000.000	12	29.342.150	100	97,81	DAU
	BELANJA DAERAH				43.405.914.029		9.933.027.343	10.521.827.691		1.996.135.824			

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinkominfo Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinkominfo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinkominfo berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sebagai berikut:

- a. Persentase Indikator kinerja *"Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif"* tercapai 100%, target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 35% dan terealisasi 85,29%. Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 30%. Dari 102 Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi Dinkominfo, tercatat ada 87 lembaga binaan yang masuk dalam kategori aktif dalam melakukan diseminasi informasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja *"Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif"* diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor pendorong:

- Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan; dan
- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika secara intensif dan terstruktur.

2) Faktor penghambatnya adalah; Masih minimnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.

- b. Indikator kinerja *"Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik"* tercapai 100% dengan realisasi sebesar 140,96% melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%, Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun

sebelumnya karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang dimulai di tahun 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja *“Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik”* adalah sebagai berikut:

1) Faktor pendorong:

- Berjalannya prosedur produksi dan upload konten.
- Sinergitas dengan instansi vertikal dan Forum Jurnalis Temanggung (FJT).

2) Faktor penghambat:

Belum optimalnya infrastruktur pendukung media, alat peliputan, fasilitas pemrosesan dan sarana produksi.

- c. Indikator kinerja *“Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo”* tercapai 100%. Pada tahun 2024 indikator kinerja ini menetapkan target 85% dan terealisasi 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja *“Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo”* adalah sebagai berikut:

1) Faktor pendorong:

Sudah berjalanya sinergi dan kolaborasi dengan para admin layanan aduan diinstansi perangkat daerah Pemkab Temanggung maupun diluar Pemkab Temanggung.

2) Faktor penghambat:

Kurang responsifnya jawaban dan tindak lanjut dari Perangkat Daerah yang mendapatkan aduan dari masyarakat.

- d. Indikator kinerja “*Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik*” tercapai 100%. Penghitungan indikator kinerja ini adalah menghitung Jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang berfungsi/bisa dipakai dibagi jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK dikali 100%. Jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK sebanyak 69 termasuk Kecamatan dan Kelurahan, jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang baik sebanyak 69 OPD.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja “*Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik*” adalah:

1) Faktor pendorong:

- Ketercukupan bandwidth didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah.
- Tersedianya jaringan FO ke beberapa OPD.
- Tersedianya jaringan radio dengan beberapa titik repeater untuk mengcover jaringan sampai ke desa.
- Telah diaktifkan jaringan VPN (*Virtual Private Network*) Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2) Faktor penghambat:

- Jaringan FO belum mengcover semua OPD;
- Peralatan jaringan radio mudah rusak/mati karena faktor alam.
- Penggunaan VPN diperlukan resetting pada masing-masing jaringan di desa yang tidak terhubung secara fisik sehingga membutuhkan waktu dan tenaga teknis khusus di desa untuk melakukannya.

- e. Indikator kinerja “*Persentase layanan publik secara elektronik*” target 50% terealisasi 50,38% atau tercapai 100,76%. Angka persentase layanan publik secara elektronik diperoleh dari rumus jumlah layanan publik elektronik dibagi jumlah layanan publik yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja "*Persentase layanan publik secara elektronik*" sebagai berikut:

1) Faktor pendorong:

- Tersedianya layanan publik secara elektronik di semua OPD yang menyelenggarakan layanan publik.
- Tersedianya infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Terpenuhi tenaga ahli Programmer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan digitalisasi layanan publik.

2) Faktor penghambat:

- Permohonan pembuatan aplikasi diluar layanan publik dan dilaksanakan mendadak karena kebutuhan pimpinan.
- Kurangnya kesadaran dari OPD yang menyelenggarakan layanan publik untuk melaksanakan digitalisasi layanan publik.

f. Ketersediaan Data Statistik Sektor tercapai 100%. Target yang ditetapkan sebesar 73,93% dan terealisasi 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja "*Ketersediaan data statistik sektoral*" adalah sebagai berikut:

1) Faktor pendorong:

- Sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung
- Ketersediaan data di tiap OPD serta data statistik dasar merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh BPS sehingga data ini akan selalu update setiap tahunnya.

2) Faktor penghambat:

Data dihasilkan melalui kegiatan statistik dasar yang merupakan kewenangan BPS Kabupaten Temanggung, sehingga ketersediaanya menunggu rilis data dari instansi tersebut.

- g. Indikator kinerja “*Persentase penilaian resiko keamanan informasi*” target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 33,3% dan terealisasi 87,67% atau tercapai 263,27%. Capaian tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 cenderung stabil pada posisi 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja “*Persentase penilaian resiko keamanan informasi*” adalah sebagai berikut:

1) Faktor pendorong:

Meningkatnya kemampuan SDM pengelola keamanan informasi dan sinergitas antar OPD dalam mengamankan informasi dengan terbentuknya temanggungkab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*).

2) Faktor penghambat:

Jumlah area untuk penilaian Indeks KAMI tiap tahun mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga mengakibatkan kurangnya bukti dukung di tiap area.

- h. Indikator Kinerja “*Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah*” tercapai 100%. Target yang ditetapkan sebesar 30% dan terealisasi 113,33%, tercapai 100% ditahun 2024 bahkan telah melampaui target akhir Renstra 2026 yaitu 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja “*Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah*” sebagai berikut:

a) Faktor pendorong:

SDM Keamanan informasi yang sudah dibekali dengan kemampuan untuk melaksanakan *Vulnerability Assesment* (VA).

b) Faktor penghambat:

Kerentanan keamanan informasi yang selalu berkembang mengikuti perkembangan TI.

2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 100%;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tercapai 100%;
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tercapai 100%;
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tercapai 100%;
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor tercapai 100%;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tercapai 100%;
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu tercapai 100%;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tercapai 100%;
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat tercapai 100%;
 - j. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tercapai 100%;
 - k. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tercapai 100%;
 - l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tercapai 100%;
 - m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tercapai 100%;
 - n. Pengelolaan Media Komunikasi Publik tercapai 100%;
 - o. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah tercapai 100%;
 - p. Penyelenggaraan Statistik Sektor yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia tercapai 100%;
 - q. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik tercapai 100%; dan
 - r. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100%.

3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
4. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada.
5. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada.
6. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinkominfo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mendapat predikat AA. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran yaitu *“Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dan Meningkatnya Kualitas Pengembangan Layanan Sistem Pemerintahan Secara Elektronik”* dengan capaian kinerja 100%, dengan kategori **Sangat Memuaskan.**

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo
s.d Triwulan II Tahun 2025

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN II		REALISASI 2025		CAPAIAN sd 2025	
				K	Rp		K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.067.136.433		7.444.841.375	7.444.841.375		758.401.792		2.309.935.304		31,03	
		1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.456.636.433		4.435.092.875	4.435.092.875		574.279.573		1.639.200.106		36,96
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		3.456.636.433	40	4.435.092.875	4.435.092.875	40	574.279.573	40	1.639.200.106	100	36,96	
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tunjangan ASN			242.500.000		745.009.000	745.009.000		5.463.000		6.591.000		0,88	
12.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang/ Bulan		242.500.000	7000	745.009.000	745.009.000	-	5.463.000	-	6.591.000	100	0,88	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peraturan Perundang- Undangan			170.500.000		112.752.100	112.752.100		49.319.000		53.519.297		47,47	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7.000.000	5	3.482.000	3.482.000			-	-	0,00	0,00	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		70.000.000	5	49.819.600	49.819.600	3	48.360.000	3	48.360.000	60,00	97,07	
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket		18.000.000	12	11.599.000	11.599.000	6	450.000	6	450.000	50,00	100	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN II		REALISASI 2025		CAPAIAN sd 2025	
				K	Rp		K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		10.500.000	12	5.700.000	5.700.000	6	509.000	6	509.000	50,00	8,93	
1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		30.000.000	12	25.182.000	25.182.000	6	-	6	810.000	50,00	3,22	
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		35.000.000	12	16.969.500	16.969.500	6	-	6	3.390.297	50,00	19,98	
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			127.500.000		2.088.516.400	2.088.516.400		122.838.219		599.213.442		28,69	
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jas Surat menyurat	laporan		4.000.000	12	1.855.000	1.855.000	6	-	6	-	50,00	0,00	
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		9.000.000	12	7.000.000	7.000.000	6	885.403	6	2.213.758	50,00	31,63	
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		13.500.000	12	11.422.400	11.422.400	6	1.735.000	6	1.735.000	50,00	15,19	
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		101.000.000	12	2.068.239.000	2.068.239.000	6	120.217.816	6	595.264.684	50,00	28,78	
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.000.000		63.471.000	63.471.000		6.502.000		11.411.459		17,98	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN II		REALISASI 2025		CAPAIAN sd 2025	
				K	Rp		K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		70.000.000	25	63.471.000	63.471.000	9	6.502.000	9	11.411.459	34,62	17,98	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.571.014.912		459.768.450	459.768.450		72.627.184		126.691.884			
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.571.014.912		459.768.450	459.768.450		72.627.184		126.691.884		27,56	
2.1.1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dok		3.315.363.500	12	459.768.450	459.768.450	6	72.627.184	6	126.691.884	50,00	27,56	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.748.228.335		1.094.479.500	1.094.479.500		200.107.900		354.077.900		32	
3.1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.514.662.360		1.094.479.500	1.094.479.500		200.107.900		354.077.900		32,35	
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah di Pemkab/Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	PD		1.482.662.360	46	1.094.479.500	1.094.479.500	46	200.107.900	46	354.077.900	100	32,35	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN BIDANG/ KEGIATAN BIDANG/	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)			TARGET 2025			REALISASI PER TRIWULAN II		REALISASI 2025		CAPAIAN sd 2025	
				K	Rp		K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				108.914.026			9.901.500	9.901.500		-		-		0,00
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				108.914.026			9.901.500	9.901.500		-		-		0,00
4.1.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dok.		27.833.000		5	9.901.500	9.901.500		-		-		0,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				50.501.250			374.880.000	374.880.000		500.000		500.000		0,13
5.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah				50.501.250			374.880.000	374.880.000		500.000		500.000		0,13
5.1.1	Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan non elektronik	laporan		50.501.250		12	350.000.000	350.000.000	6		6	-	50,00	0,00
5.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD		-		46	24.880.000	24.880.000	46	500.000	46	500.000	100	2,01
	BELANJA DAERAH				9.545.794.956			9.383.870.825	9.383.870.825		1.031.636.876		2.791.205.088		

Dari Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinkominfo s.d Triwulan II Tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinkominfo

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinkominfo dapat dilihat pada Tabel 2.3 Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2025
 Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 2024	Status Capaian		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Kinerja Utama:												
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	97,38	89,95	90,15	90,35	97,38	95,86	-	100,33	T		
2	Indeks SPBE	Angka	2,8	3,2	3,35	3,5	2,8	3,64	-	108,66	T		
	Indikator Kinerja Program:												
1	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	30	35	40	45	79,00	85,29	-	213,24	T		
2	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	n.a	100	100	100	32,60	295,55	-	295,55	T		
3	Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	80	85	90	100	100	100	-	100	T		
4	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	n.a	100	100	100	98,55	100	-	100	T		
5	Persentase layanan publik secara elektronik	%	n.a	50	55	60	29,01	52,67	-	95,77		AT	
6	Ketersediaan data statistik sektoral	%	62	73,93	73,97	74,01	97,83	74,20	-	100	T		
7	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	n.a	33,3	66,7	100	31,50	87,67	-	131	T		
8	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	n.a	30	60	100	33,33	35,29	-	59		AT	

Penjelasan untuk masing masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Program dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:
 - a. Nilai Keterbukaan Informasi Publik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah;
 - 1) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku PPID Pemkab Temanggung;
 - 2) Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
 - 3) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah;
 - a) Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi;
 - b) Implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkup Pemkab Temanggung belum optimal disebabkan pengelola PPID Pelaksana sering terjadi pergantian.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah;
 - a) Melakukan bimbingan kepada PPID Pelaksana melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif;
 - b) Pendampingan kepada PPID Pelaksana secara berkala dengan prioritas bagi PPID yang pengelolaannya masih rendah.
 - b. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; semakin optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah serta dukungan lintas OPD dalam pemenuhan bukti dukung.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut lebih cenderung ke sisi teknis, dan infrastruktur pendukung media, alat peliputan, fasilitas pemrosesan dan sarana produksi
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Optimalisasi dan upaya produksi variasi konten, serta penyebaran melalui media-media informasi yang menjadi favorit Masyarakat.
- c. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan kepada lembaga binaan dan mitra Dinkominfo; serta Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Masih minimnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berperan aktif dalam penyebaran informasi dan perlunya intervensi dan pendampingan kepada lembaga binaan dan mitra dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukan bimbingan kepada lembaga binaan dan mitra Dinkominfo melalui sosialisasi, bimbingan teknis, peningkatan SDM dan pendekatan persuasif.
- d. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Penyampaian konten informasi, terutama kebijakan dan program pemerintah telah berjalan sesuai target, baik dari segi kuantitas, maupun kualitas.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut lebih cenderung ke sisi teknis, dan infrastruktur pendukung media, alat peliputan, fasilitas pemrosesan dan sarana produksi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Optimalisasi dan upaya produksi variasi konten, serta penyebarluasan melalui media-media informasi yang menjadi favorit masyarakat.
- e. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Penyampaian konten informasi, terutama kebijakan dan program pemerintah yang telah berjalan sesuai target, baik dari segi kuantitas, maupun kualitas. Hal ini didasari oleh berjalannya prosedur produksi dan upload konten, serta adanya sinergitas dengan instansi vertikal dan Forum Jurnalis Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; kurang responsifnya jawaban dan tindak lanjut dari Perangkat Daerah yang mendapatkan aduan dari masyarakat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Membuat kebijakan dengan menyusun Peraturan Bupati tentang batas waktu respon aduan *Mean Time To Respons* (MTTR) dan konsekuensi apabila melebihi batas waktu.
- f. Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Ketercukupan bandwidth dan tersedianya jaringan FO ke beberapa OPD.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut karena jaringan FO belum mengcover semua OPD dan peralatan jaringan radio mudah rusak/mati karena faktor alam ditambah lagi penggunaan VPN pada masing-masing jaringan di desa tidak terhubung secara fisik sehingga

membutuhkan waktu dan tenaga teknis.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Pembangunan jaringan berbasis fiber optik untuk integrasi jaringan seluruh PD.

g. Ketersediaan data statistik sektoral

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Sinergitas kerja sama Dinkominfo dan BPS Temanggung dan ketersediaan data di tiap OPD serta data statistik dasar merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh BPS sehingga data ini akan selalu update setiap tahunnya.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Data tersebut dihasilkan melalui kegiatan statistik dasar yang merupakan kewenangan BPS Kabupaten Temanggung, sehingga ketersediaanya menunggu rilis data dari instansi tersebut.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melakukan komunikasi secara masif dengan produsen data dan Pembenahan penjadwalan kegiatan pengumpulan data statistik.

h. Persentase penilaian resiko keamanan informasi

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; Meningkatnya kemampuan SDM pengelola keamanan informasi serta sinergitas antar OPD dalam mengamankan informasi dengan terbentuknya temanggungkab-CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*).
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Jumlah area untuk penilaian Indeks KAMI tiap tahun mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, dan kurangnya bukti dukung di tiap area penilaian.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; melakukan koordinasi dengan Provinsi dan Badan Siber dan Sandi Negara dan menambah kemampuan SDM teknis.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 indikator yaitu:
 - a. Persentase layanan publik secara elektronik
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya layanan publik secara elektronik di semua OPD yang menyelenggarakan layanan publik dan tersedianya infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Permohonan pembuatan aplikasi diluar layanan publik dan dilaksanakan mendadak karena kebutuhan pimpinan dan kurangnya kesadaran dari OPD yang menyelenggarakan layanan publik untuk melaksanakan digitalisasi layanan publik Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Melaksanakan prioritas pengembangan dan pembuatan aplikasi sesuai dengan permohonan dari OPD, dan memberikan pemahaman kepada OPD tentang pentingnya penyelenggaraan layanan publik secara elektronik.
 - b. Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah; SDM Keamanan informasi yang sudah dibekali dengan kemampuan untuk melaksanakan VA.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah; Kerentanan keamanan informasi yang selalu berkembang mengikuti perkembangan TI.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah; Mengupdate Kemampuan SDM dan Peralatan yang digunakan untuk melaksanakan VA.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras tidak ada.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinkominfo terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu Data Makro Daerah, Data Pokok Bidang Komunikasi dan Informatika, Data Pokok Bidang Statistik, dan Data Pokok Bidang Persandian dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Makro Daerah

a. Pendapatan Per kapita

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

TAHUN	PDRB Per KAPITA ADHB	
	Nilai (Ribu Rp.)	Pertumbuhan (%)
2021	28.484,02	2,82
2022	30.925,80	8,57
2023	33.433,54	8,10
2024	35.494,31	6,62
2025*	35.494,31	6,62

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung secara umum selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan 8,35% dibanding tahun 2021 yaitu di angka Rp. 30.837,32 (ribu). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kabupaten Temanggung tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, tren kenaikan ini berlanjut di tahun 2023

dengan jumlah Pendapatan per kapita yang naik 7,95% dari tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 33.288,96 (ribu) kemudian pada tahun 2024 naik 6,62% yaitu sebesar Rp. 35.494,31 (ribu) yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2020 s.d 2024.

PDRB per kapita merupakan data tahunan dan menggunakan data n-1 sebagai dasar perhitungannya, sehingga data pokok Triwulan II tahun 2025 nilainya sama dengan data pendapatan per kapita di tahun 2024.

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase atau jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu populasi atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

Rumus untuk menghitung angka kemiskinan dalam suatu populasi atau negara adalah sebagai berikut:

$$\text{Angka Kemiskinan} = \frac{\text{Jml Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Angka Kemiskinan Tahun 2021-2025

No	Tahun	Angka Kemiskinan		
		Temanggung	Jateng	Nasional
1	2021	10,17	11,79	9,71
2	2022	9,33	10,93	9,57
3	2023	9,26	10,77	9,36
4	2024	8,67	10,47	9,03
5	2025	8,67	9,58	8,57

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 hingga 2025 terjadi penurunan angka kemiskinan di

Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional. Angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung cenderung lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu di angka 8,67 Tahun 2024. Pada tahun 2024 ini angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan 0,59 dibanding tahun 2023. Tren penurunan angka kemiskinan baik di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional menunjukkan adanya keberhasilan program pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program-program yang mendorong pengentasan kemiskinan.

Untuk angka kemiskinan merupakan data tahunan, data tingkat kabupaten ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Temanggung pada akhir bulan Maret Tahun 2025.

c. Ketimpangan Pendapatan (Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia)

Pemerataan pendapatan merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan nasional. Semakin merata distribusi pendapatan masyarakat disuatu negara/daerah maka semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan, hal ini mencerminkan bahwa kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di negara/daerah tersebut merata.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk (Bank Dunia). Untuk mengetahui distribusi pendapatan (ketimpangan pendapatan) suatu masyarakat dapat dihitung melalui perhitungan distribusi pengeluaran. Kriteria menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut (dalam Susenas BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2020).

- 1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen;
- 2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen; dan
- 3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

Tabel 2.6

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	40% Bawah	18,78	18,46	19,52	17,83	17,83
2	40% Tengah	35,54	36,34	36,64	36,19	36,19
3	20% Atas	45,68	45,19	44,84	45,98	45,98

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

*Data tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024

Data Persentase Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia menurut Kabupaten Temanggung tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 karena merupakan data n-1. Berdasarkan data pada tabel diatas, bisa dilihat bahwa menurut kriteria Bank Dunia, kelompok masyarakat berpendapatan rendah di tahun 2024 mengalami kenaikan pendapatannya dibandingkan tahun 2023, dari 19,52% menjadi 17,83%. Dari angka tersebut bisa dilihat bahwa di Kabupaten Temanggung tidak ada ketimpangan pengeluaran karena porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen. Porsi pendapatan mereka yang

berpenghasilan rendah masih jauh dibawah kelompok berpenghasilan menengah yang menerima sejumlah 36,19 dari total pendapatan penduduk secara keseluruhan, dan jauh dibawah kelompok berpenghasilan tinggi yang menerima 45,98 persen dari total pendapatan secara keseluruhan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (International labour organization). Biasanya pengangguran ini terjadi karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia atau karena adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan keahlian tenaga kerja dan pendidikan. Permasalahan paling pokok terletak pada kesempatan kerja, ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan tenaga kerja yang akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Pengangguran terbuka dapat menjadi masalah dalam perekonomian karena dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Rumus untuk menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Temanggung dari
Tahun 2021-2025

Tahun	TPT (%)	TPT Jateng	TPT Nasional
2021	2,62	5,95	6,49
2022	2,54	5,57	5,83
2023	2,32	5,13	5,45
2024	2,35	4,78	4,91
2025*	2,35	4,78	4,91

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

**Data tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024*

Dari tabel 2.7 diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2020 sampai tahun 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya, namun untuk tahun 2024 TPT di Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan dari 2,32 pada tahun 2023 menjadi 2,35 pada tahun 2024. Meskipun begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung tahun 2024 di angka 2,35 yang berarti bahwa diantara 100 penduduk di Kabupaten Temanggung yang masuk dalam usia angkatan kerja terdapat 3 orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Akan tetapi diluar jumlah penduduk usia kerja yang menganggur sama sekali masih banyak penduduk dalam usia kerja yang berstatus setengah pengangguran dan pengangguran terselubung, dimana pekerja yang bersangkutan mempunyai pekerjaan tetapi belum optimal dilihat dari jam kerjanya yakni dibawah 35 jam dalam seminggu.

2. Indikator Sasaran Daerah

a. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indek SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai:

- 1) Domain Kebijakan Internal SPBE;
- 2) Domain Tata Kelola SPBE;
- 3) Domain Manajemen SPBE;
- 4) Domain Layanan SPBE.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8
Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Adapun Nilai Indeks SPBE Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Indeks SPBE Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	*2025
1	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,78	3,12	2,80	3,64	3,64

Sumber: Dinkominfo Kab.Temanggung 2025

**Data tahun 2025 masih sama dengan data tahun 2024*

Capaian Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Triwulan 4 tahun 2024 yaitu 3,64. Dengan indeks 3,64 (predikat sangat baik) secara umum dapat digambarkan bahwa infrastruktur SPBE, layanan publik secara elektronik, keamanan data dan informasi di Kabupaten Temanggung dinilai baik. Dampak manfaatnya adalah masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan layanan-layanan publik yang disediakan oleh Pemkab. Temanggung dengan mudah, seperti free wifi di area publik, pelayanan publik berbasis elektronik yang efektif dan efisien, keamanan dan kenyamanan pengelolaan data pemerintah, serta jaminan tindak lanjut atas aduan dan keluhan masyarakat.

Dibawah ini disajikan hasil evaluasi nilai kematangan penyelenggaraan SPBE yang diperoleh Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Tabel 2.10
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

Hasil Evaluasi SPBE 2024		
Nama Form	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2024
Tahun	:	2024
Deskripsi	:	Evaluasi Penerapan SPBE 2024
Pemerintah Kab. Temanggung		
K/L/D	:	Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	:	3.64
Predikat SPBE	:	Sangat Baik
Nilai Indeks		
Domain Kebijakan SPBE	:	3.80
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3.80
Domain Tata Kelola SPBE	:	3.10
Perencanaan Strategis SPBE	:	2.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	3.75
Penyelenggara SPBE	:	3.50
Domain Manajemen SPBE	:	2.09
Penerapan Manajemen SPBE	:	2.25
Audit TIK	:	1.67
Domain Layanan SPBE	:	4.46
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	4.10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	5.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 4 (empat) domain penilaian, perolehan nilai pada Domain Manajemen mendapati nilai yang paling rendah dibanding domain yang lain. Nilai ini dipengaruhi oleh kurangnya data dukung yang terdiri atas dokumentasi proses penyusunan dari awal hingga terbentuk dokumen manajemen SPBE. Domain Manajemen SPBE memiliki 2

(dua) aspek, yaitu aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK. Pada aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkab Temanggung mendapat maturity level 1 karena dianggap kegiatan manajemen SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana. Dalam hal ini, terdapat 8 indikator penerapan manajemen SPBE, yaitu:

- 1) Penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- 2) Penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
- 3) Penerapan Manajemen Data;
- 4) Penerapan Manajemen Aset TIK;
- 5) Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 6) Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 7) Penerapan Manajemen Perubahan;
- 8) Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

Secara faktual, aspek penerapan ini sudah berjalan seperti pada manajemen data, manajemen asset TIK, manajemen layanan, manajemen SDM dan manajemen keamanan. Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian sehingga diberikan indeks maturity level 1.

Pada Aspek yang lain pada Domain Manajemen adalah Aspek Audit TIK. Pada Aspek ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:

- 1) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE;
- 2) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE;
- 3) Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

b. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan keterbukaan dan pelayanan publik pada masyarakat salah satunya dapat diukur dari Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan pemeringkatan keterbukaan badan publik kabupaten/kota terhadap implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah bagian dari evaluasi dan penilaian tahunan tata kelola informasi publik pada badan publik, terutama di lingkungan badan publik pemerintah kabupaten/kota. Pemeringkatan keterbukaan badan publik ini dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Pemerintah Kabupaten Temanggung terkait Keterbukaan Informasi Publik juga berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor

555/318 Tahun 2023 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Tahapan pemeringkatan keterbukaan badan publik adalah sebagai berikut:

1) Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ (Self Assesment Quessionnaire).

Tahapan awal adalah pengisian SAQ yang hasilnya dikategorikan sebagai berikut:

- a. Nilai SAQ 100 – 97, kategori informatif;
- b. Nilai SAQ 96 – 80, kategori menuju informatif;
- c. Nilai SAQ 79 – 60, kategori cukup informatif;
- d. Nilai SAQ 59 – 40, kategori kurang informatif;
- e. Nilai SAQ 39 – 0, kategori tidak informatif;

2) Visitasi Verifikasi

Visitasi verifikasi dilakukan kepada 20 (dua puluh) badan publik dengan nilai SAQ tertinggi. Dalam visitasi dilakukan verifikasi atas jawaban SAQ dengan memeriksa seluruh item jawaban dengan data dukung yang tersedia.

3) Uji Publik

Badan Publik nominatif akan di undang untuk uji publik melalui kegiatan presentasi dihadapan tim penilai. Presentasi akan melakukan penilaian terhadap kebijakan komitmen, program dan kegiatan Badan Publik dalam hal mewujudkan keterbukaan Badan Publik serta inovasi-inovasi layanan publik berbasis keterbukaan informasi.

4) Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola

informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah: Penilaian akhir dilakukan oleh tim penilai bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan badan publik yang memiliki tata kelola informasi publik terbaik berdasarkan akumulasi peringkat nilai. Dasar perhitungan peringkat adalah:

- Hasil evaluasi penilaian website;
- Hasil penilaian SAQ hasil verifikasi;
- Uji publik

Tabel 2.11
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten
Temanggung Tahun 2021-2025

No	Indikator Sasaran	Nilai Tahun				
		2021	2022	2023	2024	*2025
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	89,56	88,33	97,38	95,86	95,86
Kategori		Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif

Sumber : Dinkominfo Kab. Temanggung 2025

**Data tahun 2025 masih sama dengan data tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat dilihat, bahwa pada tahun 2024 nilai KIP Pemerintah Kabupaten Temanggung mencapai 95,86 dengan kategori Informatif. Ini merupakan capaian kedua PPID Pemkab Temanggung sebagai Badan Publik Informatif dalam pelaksanaan implementasi KIP sejak tahun 2012.

Prestasi tersebut dikarenakan oleh upaya dan kerja keras dari seluruh pemangku keterbukaan informasi publik di Pemkab Temanggung, baik PPID Kabupaten Temanggung, seluruh PPID Pelaksana dan semua stakeholder terkait.

Upaya tersebut antara lain dengan penguatan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) PPID

Pelaksana, pengesahan regulasi dan SOP, pendampingan, monitoring dan evaluasi rutin PPID Pelaksana, pengembangan website dan dashboard PPID, serta peningkatan layanan kepada masyarakat. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya perbaikan kedepan, diuraikan sebagai berikut:

1) Faktor Pendorong

- a) Meningkatnya kapasitas SDM pelaku PPID Pemkab Temanggung;
- b) Pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan;
- c) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara intensif dan terstruktur.

2) Faktor Penghambat

- a) Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi;
- b) Implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkup Pemkab Temanggung belum optimal disebabkan pengelola PPID Pelaksana sering terjadi pergantian.

3) Upaya Kedepan

- a) Melakukan bimbingan kepada PPID Pelaksana melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif.
- b) Pendampingan kepada PPID Pelaksana secara berkala dengan prioritas bagi PPID yang pengelolaanya masih rendah.

Gambar 2.1 merupakan piagam penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dan Gambar 2.2 merupakan berita prestasi PPID Pemkab Temanggung pada malam penganugerahan KIP Award Tahun 2024.



Gambar 2.1
Penghargaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024



Ket / Foto : PPID Badan Publik Pemkab Temanggung Pertahankan Kategori Informatif pada KIP Award 2024

**PPID Badan Publik Pemkab Temanggung Pertahankan Kategori
Informatif pada KIP Award 2024**

Gambar 2.2
Berita PPID Pemkab Temanggung Berhasil Raih Kategori
Informatif Tahun 2024

3. Indikator Program Dinkominfo

- a. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08 /Per/M.Kominfo/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah terkait Lembaga Komunikasi Sosial, Dinkominfo memiliki tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan optimalisasi diseminasi informasi dengan lembaga binaan tersebut.

Lembaga binaan tersebut meliputi Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Saka Milenial, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), dan Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (RTIK), dengan rincian jumlah total lembaga binaan Dinkominfo, sebagai berikut:

- 1) Lembaga Penyiaran; yang terdiri:
 - a) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), yaitu Radio Temanggung (eRTe) FM, dan LPPL Temanggung TV (2)
 - b) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), yaitu OFA Radio, Shantika FM, Angkasa Tujuh, Radio O2, dan Pop FM (5)
- 2) FK Metra;
- 3) Relawan TIK;

- 4) Saka Milenial;
- 5) ORARI;
- 6) RAPI; dan
- 7) KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

Rumus untuk menghitung persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif adalah; Jumlah lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif dibagi Jumlah total lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo dikali 100%.

Tabel 2.12
Persentase Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi
Informasi Dinkominfo yang aktif Tahun 2025 s/d
Triwulan II

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*
1	Jumlah lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	na	na	na	87	87
2	Jumlah total lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo	na	na	na	102	102
	Persentase	na	na	na	85.29	85.29

**Data tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2025 nilai persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif yang merupakan indikator program tahun pertama Renstra 2024-2026 mencapai 85,29 persen, angka ini ditunjang oleh keaktifan Lembaga Penyiaran, FK Metra, Saka Milenial, RTIK, ORARI dan RAPI. Adapun untuk KIM belum seluruhnya aktif, disamping masih adanya

pembentukan KIM-KIM baru dengan berlatarbelakang hobi/interest dan kewilayahan (KIM Desa).

Tabel 2.13
Daftar Lembaga Binaan dan Mitra Diseminasi Informasi
Dinkominfo

No	Nama Lembaga	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Lembaga Penyiaran	7	7	0
2	FK Metra	1	1	0
3	Relawan TIK	1	1	0
4	Saka Milenia	1	1	0
5	Orari	1	1	0
6	Rapi	1	1	0
7	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	90	75	15
	Jumlah	102	87	15

Tabel 2.14
Lembaga Penyiaran Kabupaten Temanggung

No	Nama	Aktif	Tidak Aktif
1	LPPL Radio Temanggung (eRTe FM)	v	
2	LPPL Temanggung TV	v	
3	Radio Angkasa 7	v	
4	Radio OFA	v	
5	Radio O2	v	
6	Radio Santika		v
7	POP FM Parakan	v	
	Jumlah	6	1

Tabel 2.15
Daftar Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kabupaten Temanggung

No.	Nama KIM	Alamat	Tahun Pembentukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
1	Kayana	Desa Danupayan Kec. Bulu	2017	√	
2	Tergalurung	Desa Tegalurung Kec. Bulu	2017	√	

No.	Nama KIM	Alamat	Tahun Pembe- n- tukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
3	Almond	Desa Mondoretno Kec. Bulu	2017	√	
4	Sari Makmur	Desa Campursari Kec. Bulu	2017		√
5	Sebid	Desa Putat Kec. Bulu	2017	√	
6	Bansari	Desa Bansari Kec. Bulu	2017		√
7	Pandemulyo	Desa Pandemulyo Kec. Bulu	2017	√	
8	Ngudi Sari	Desa Malangsari Kec. Bulu	2017		√
9	Pengilon	Desa Pengilon Kec. Bulu	2017	√	
10	Loh Jinawi	Desa Gandurejo Kec. Bulu	2017	√	
11	Prasasti	Desa Gondosuli Kec. Bulu	2017		√
12	Cinta Ngimbrang	Desa Ngimbrang Kec. Bulu	2017		√
13	Madani	Desa Pagergunung Kec. Bulu	2017	√	
14	KIM Pakurejo	Desa Pakurejo Kec. Bulu	2017		√
15	De Pasthi	Desa Pasuruhan Kec. Bulu	2017	√	
16	KIM Tegalrejo	Desa Tegalrejo Kec. Bulu	2017	√	
17	Tirto Meteor	Desa Wonotirto Kec. Bulu	2017		√
18	Wonosari	Desa Wonosari Kec. Bulu	2017	√	
19	Bulu Jaya	Desa Bulu Kec. Bulu	2017	√	
20	Maju Makmur	Desa Karangtejo Kec. Jumo	2018		√
21	Bersama	Desa Jombor Kec. Jumo	2018	√	
22	Jaya Utama	Desa Jamusan Kec. Jumo	2018	√	
23	Tentrem	Desa Sukomarto Kec. Jumo	2018	√	
24	Legowo	Desa Giyono Kec. Jumo	2018	√	
25	Podo Maju	Desa Morobongo Kec. Jumo	2018	√	
26	Taruna Bhakti	Desa Barang Kec. Jumo	2018		√
27	Manggala	Desa Gununggempol Kec. Jumo	2018	√	
28	Berlian	Desa Padureso Kec. Jumo	2018	√	

No.	Nama KIM	Alamat	Tahun Pembe- n- tukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
29	Lancar Jaya	Desa Kertosari Kec. Jumo	2018	√	
30	Damai Sejahtera	Desa Ketitang Kec. Jumo	2018	√	
31	Sido Dadi	Desa Gedongsari Kec. Jumo	2018	√	
32	Adipati Sindurejo	Desa Jumo Kec. Jumo	2018	√	
33	Digdaya	Desa Campurejo Kec. Tretep	2022	√	
34	Notif	Desa Tretep Kec. Tretep	2022	√	
35	Tlogo Wangi	Desa Tlogo Kec. Tretep	2022	√	
36	Bojong Sejahtera	Desa Bojong Kec. Tretep	2022	√	
37	KIM Desa Bendungan	Desa Bendungan Kec. Tretep	2022	√	
38	Bonjor Bersinar	Desa Bojor Kec. Tretep	2022		√
39	Abhi Praya	Desa Simpar Kec. Tretep	2022		√
40	Nglarangan Andalan	Desa Nglarangan Kec. Tretep	2022	√	
41	Raharjo	Desa Sigedong Kec. Tretep	2022	√	
42	Tempelsari Bangkit	Desa Tempelsari Kec. Tretep	2022	√	
43	Donorojo Maju	Desa Donorojo Kec. Tretep	2022	√	
44	Pamitran	Desa Pitrosari Kec. Wonoboyo	2022	√	
45	-	Desa Wates Kec. Wonoboyo	2022		√
46	KIM Pateken	Desa Pateken Kec. Wonoboyo	2022	√	
47	Rejo Mandiri	Desa Rejosari Kec. Wonoboyo	2022	√	
48	Semoetgatel	Desa Tening Kec. Wonoboyo	2022	√	
49	-	Desa Wonocoyo Kec. Wonoboyo	2022		√
50	Tawangsari Berdaulat	Desa Tawangsari Kec. Wonoboyo	2022		√
51	Mandiri	Desa Wonoboyo Kec. Wonoboyo	2022	√	
52	Ndeso Adem	Desa Kebonsari Kec. Wonoboyo	2022		√
53	-	Desa Cemoro Kec. Wonoboyo	2022	√	
54	Mandiri	Desa Purwosari Kec. Wonoboyo	2022	√	
55	Bangun Jiwo	Desa Pesantren Kec. Wonoboyo	2022	√	

No.	Nama KIM	Alamat	Tahun Pembe- n- tukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
56	Parikesit	Desa Semen Kec. Wonoboyo	2022	√	
57	Langgeng Gumregah	Desa Langgeng Kec. Tlogomulyo	2023	√	
59	Jaya Mandiri	Desa Losari Kec.Tlogomulyo	2023	√	
59	Kebondalem Lugas	Desa Kebondalem Kec.Bejen	2023	√	
60	Menggora Jaya	Desa Menggora Kec. Tembarak	2023	√	
61	Barokah	Desa Purwodadi Kec. Temarak	2023	√	
62	BLITZ	Desa Banjarsari Kec. Ngadirjo	2023	√	
63	Kataan		2023	√	
64	Pringsurat	Desa Pringsurat Kec. Pringsurat	2023	√	
65	Berdaya	Desa Kebuman Ke. Pringsurat	2023	√	
66	Kopen	Desa Kopen Kec. Pringsurat	2023	√	
67	Bangkit	Desa Karangwuni Kec.Pringsurat	2023	√	
68	Gowak	Desa Gowak Kec. Pringsurat	2023	√	
69	Bangkit	Desa Rejosari Kec.Pringsurat	2023	√	
70	Ngipik Bersatu	Desa Ngipik Kec. Pringsurat	2023	√	
71	Kokoh Mandiri	Desa Pingit Kec.Pringsurat	2023	√	
72	Wonokerso Hebat	Desa Wonokerso Kec.Pringsurat	2023	√	
73	Tegowanuh Jaya	Desa Twgowanuh Kec. Kaloran	2023	√	
74	Pengayoman	Kel.Temanggung II Kec.Tmg	2023	√	
75	JOTEC	Desa Joho Kec.Tmg	2023	√	
76	"NN"	Desa Nampirejo Kec.Tmg	2023	√	
77	Lentera Jurang	Kel.Jurang Kec.Tmg	2023	√	
78	Madukismo	Kel.Madureso Kec.Tmg	2023	√	
79	Manding Kreatif	Kel.Manding Kec.Tmg	2023	√	
80	Purworwjo Kreatif	Kel.Purworejo Kec.Tmg	2023	√	
81	e- pawartos	Kel.Walitelon Utara Kec.Temanggung	2023	√	
82	Berdikari	Desa Candimulyo Kec.Kedu	2023	√	

No.	Nama KIM	Alamat	Tahun Pembe- n- tukan	Status	
				Aktif	Tidak Aktif
83	Berbudi Luhur	Desa Danurejo Kec.Kedu	2023	√	
84	Berisik	Desa Gondangwayang Kec.Kedu	2023	√	
85	Karangtejo Update	Desa Karangtejo Kec.Kedu	2023	√	
86	Cerdas	Desa Kutoanyar Kec.Kedu	2023	√	
87	Berseri	Desa Mergowati Kec. Kedu	2023	√	
88	Berdikari	Desa Mojotengah Kec. Kedu	2023	√	
89	Mandiri	Desa Bojonegoro Kec. Kedu	2023	√	
90	KEDU	Desa Kedu Kec.Kedu	2023	√	
Jumlah				75	15

b. Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik

Diseminasi informasi merupakan kewajiban yang melekat pada pemerintah dengan seluruh unsurnya dengan melibatkan seluruh kanal komunikasi dan media yang dikelola. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/KOMINFO/03/2009 yang menyatakan bahwa diseminasi informasi bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat integritas (persatuan dan kesatuan) nasional.

Adapun arah dari diseminasi informasi adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi. Diseminasi informasi juga untuk memenuhi hak publik/masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, cepat dan mudah diakses.

Dinkominfo sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan kewajiban melaksanakan diseminasi informasi mengelola media dan kanal komunikasi publik, yaitu Media Komunikasi Resmi Milik Pemerintah Daerah (Website, Media Center, Media Sosial, Videotron, Baliho Luar Ruang) serta LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung.

Adapun persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik didapatkan dengan rumus: Jumlah konten diseminasi informasi yang terealisasi dibagi Jumlah total konten diseminasi informasi yang ditargetkan dikali 100% (total target konten dalam satu tahun yaitu 1.460 konten).

Tabel 2.16
Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah konten diseminasi informasi yang disampaikan	na	na	na	2058	4315
2	Jumlah target konten diseminasi informasi yang disampaikan	na	na	na	1460	1460
	Persentase	na	na	na	100	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Program Persentase Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui Kanal Media Elektronik dan Non Elektronik pada Triwulan II Tahun 2025 telah mencapai 100%. Capaian ini mengukur pada sifat konten publikasi dan informasi yang diupdate, mengikuti

perkembangan isu, kejadian dan kebijakan yang ada pada tahun 2025 ini.

Tabel 2.17
Konten Diseminasi Informasi Media dan kanal Komunikasi Publik Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Jenis Kanal Media	Target Konten	Realisasi	Persentase
1	Media Elektronik	1390	4315	100
2	Media Non elektronik	70	14	20,00
	Jumlah	1460	4330	100

- c. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo

Dinkominfo menjadi lembaga teknis daerah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memfasilitasi layanan pelaporan dan aduan dari masyarakat, berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 337/166 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Whatsapp Gateway (WAGE) Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo, didapatkan dengan rumus: Jumlah laporan dan aduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah total laporan dan aduan dikali 100%.

Tabel 2.18
Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat
Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah laporan dan aduan yang ditindaklanjuti	n/a	n/a	n/a	1049	453
2	Jumlah total laporan dan aduan	n/a	n/a	n/a	1049	453
	Persentase	n/a	n/a	n/a	n/a	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo tercapai 100%. Dari 453 laporan aduan masyarakat yang diajukan kepada Dinkominfo semua sudah ditindaklanjuti yaitu sejumlah 453 aduan.

Layanan aduan yang dikelola oleh Pemkab Temanggung adalah:

- 1) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N LAPOR! Aplikasi dari Pemerintah Pusat dikelola oleh MenPAN RB;
- 2) LaporGub Portal Laporan Pengaduan Online Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah;
- 3) SMS Gateway dan Whatsapp Gateway (WAGE) dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (sebagai super admin) dan Perangkat Daerah (sebagai admin).

Tabel 2.19
Rekapitulasi Tindak Lanjut Penyelesaian Aduan Masyarakat
Sd. Triwulan II Tahun 2025

No	Media Layanan Aduan	Jumlah Aduan	Aduan Selesai	Persentase
1	SP4N lapor	68	68	100%
2	LaporGub	28	28	100%
3	SMS Gateway & Whatsapps Gateway (Wage)	357	357	100%
	Jumlah	453	453	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan dan Aduan Masyarakat Melalui Kanal Aduan yang dikelola Dinkominfo tercapai 100%.

d. Persentase Kinerja infrastruktur TIK yang baik

Di tengah arus modernisasi dan transformasi digital yang melanda dunia saat ini, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi fondasi penting bagi kemajuan sebuah wilayah, tak terkecuali Kabupaten Temanggung. Sebagai sebuah entitas pemerintahan yang progresif, pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengarahkan perhatiannya pada pengembangan infrastruktur TIK yang berkualitas dan responsif. Dengan kesadaran akan pentingnya konektivitas digital dalam mendukung berbagai aspek pembangunan, baik dalam pelayanan publik maupun sektor ekonomi lokal, upaya pembangunan infrastruktur TIK yang baik menjadi sebuah prioritas yang tak terelakkan.

Kinerja infrastruktur TIK yang baik di Kabupaten Temanggung tercermin melalui berbagai indikator, mulai dari ketersediaan akses internet yang luas dan cepat hingga integrasi sistem informasi yang efisien

dalam proses administratif pemerintahan. Dengan adopsi teknologi yang tepat, pemerintah Kabupaten Temanggung mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan akses informasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha dan inovasi.

Angka presentasi kinerja infrastruktur TIK yang baik diperoleh dari rumus jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang berfungsi/bisa dipakai dibagi dengan jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK dikali 100%. Adapun capaian hingga tahun 2025 Triwulan II disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.20
Persentase Kinerja Infrastruktur TIK yang baik di
Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah OPD dengan infrastruktur TIK yang berfungsi/bisa dipakai	n/a	n/a	n/a	69	69
2	Jumlah OPD yang terfasilitasi infrastruktur TIK	n/a	n/a	n/a	69	69
	Persentase	n/a	n/a	n/a	100	100

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Infrastruktur TIK di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sudah terkoneksi mencapai 100%, karena di tahun 2024 sudah dapat di perbaiki peralatan yang rusak di beberapa kelurahan.

Faktor pendorong ketercapaian indikator kinerja infrastruktur TIK yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Temanggung nomor 83 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong pemanfaatan jaringan intranet untuk proses bisnis Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- 2) Telah tersedianya Infrastruktur TIK berupa jaringan fiber optic dan jaringan radio (antena) untuk mengkoneksikan Jaringan intra dan internet ke OPD (Dinas, Kecamatan dan kelurahan) di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun faktor penghambat indikator tersebut adalah:

- 1) Perangkat kedaluwarsa atau tidak tergantikan yaitu peralatan jaringan yang sudah usang atau tidak lagi didukung oleh produsen dapat menyebabkan kinerja jaringan menjadi terganggu jika terjadi kerusakan pada peralatan tersebut yang sudah tidak di produksi lagi oleh produsen atau pabrik (*discontinue*).
- 2) Kerusakan peralatan yang diakibatkan karena usia pemakaian yang sudah lama sehingga membuat peralatan yang digunakan sudah menurun kinerjanya serta belum terupdatenya fitur-fitur terbaru.

Tabel 2.21
Data Jumlah OPD yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari
Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Uraian	2025	Terkoneksi Jaringan Dinkominfo	Kondisi	
				UP	Tidak aktif
1	Jumlah Kantor/Badan/Dinas	26	26	26	26
2	Jumlah Kecamatan	20	20	20	20
3	Jumlah Kelurahan	23	23	23	23
JUMLAH		69	69	69	69

Tabel 2.22
Data Kantor/Badan/Dinas yang terfasilitasi Infrastruktur
TIK dari Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2025

No	Instansi	Status	
		UP	Down
1	Dinhab	√	
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	√	
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	√	
4	Dinkes	√	
5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	√	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	
7	Dinas Penanaman Modal	√	
8	DPRD Temanggung	√	
9	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	√	
10	Dinas Sosial	√	
11	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	√	
12	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	√	
13	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga	√	
14	Dindukcapil	√	
15	Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah	√	
16	Dinas Tenaga Kerja	√	
17	Bappeda	√	
18	Dinas Lingkungan Hidup	√	

No	Instansi	Status	
		UP	Down
19	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	√	
20	Sekretariat Daerah	√	
21	Inspektorat	√	
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	√	
23	Dinbudpar	√	
24	Dinpermades	√	
25	DKPPP	√	
26	BPBD	√	
Jumlah		26	

Tabel 2.23
Data Kecataman yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari
Dinkominfo Tahun 2025

No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Kecamatan Temanggung	√	
2	Kecamatan Pringsurat	√	
3	Kecamatan Kranggan	√	
4	Kecamatan Selopampang	√	
5	Kecamatan Tembarak	√	
6	Kecamatan Tlogomulyo	√	
7	Kecamatan Bulu	√	
8	Kecamatan Kedu	√	
9	Kecamatan Kaloran	√	
10	Kecamatan Kandangan	√	
11	Kecamatan Jumo	√	
12	Kecamatan Gemawang	√	
13	Kecamatan Bansari	√	
14	Kecamatan Kledung	√	
15	Kecamatan Ngadirejo	√	
16	Kecamatan Candirotto	√	
17	Kecamatan Wonobojo	√	
18	Kecamatan Tretep	√	
19	Kecamatan Bejen	√	
20	Kecamatan Parakan	√	
Jumlah		20	-

Tabel 2.24
Data Kelurahan yang terfasilitasi Infrastruktur TIK dari
Dinkominfo Tahun 2025

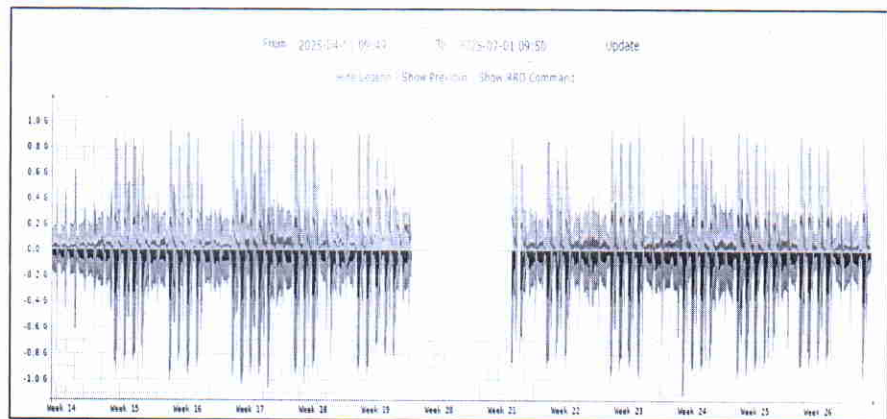
No	Instansi	Status	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Kelurahan Kranggan	√	
2	Kelurahan Manggong	√	
3	Kelurahan Parakan Kauman	√	
4	Kelurahan Parakan Wetan	√	
5	Kelurahan Banyuurip	√	
6	Kelurahan Temanggung I	√	
7	Kelurahan Temanggung II	√	
8	Kelurahan Butuh	√	
9	Kelurahan Jampirejo	√	
10	Kelurahan Jampiroso	√	
11	Kelurahan Kertosari	√	
12	Kelurahan Kowangan	√	
13	Kelurahan Sidorejo	√	
14	Kelurahan Jurang	√	
15	Kelurahan Kebonsari	√	
16	Kelurahan Manding	√	
17	Kelurahan Mungseng	√	
18	Kelurahan Giyanti	√	
19	Kelurahan Purworejo	√	
20	Kelurahan Madureso	√	
21	Kelurahan Tlogorejo	√	
22	Kelurahan Walitelon Selatan	√	
23	Kelurahan Walitelon Utara	√	
Jumlah		23	-

Dari tabel data dukung diatas seluruh OPD infrastruktur jaringan intra dan internetnya sudah dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dengan maksimal.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kuat dan handal adalah fondasi utama bagi pelayanan yang efisien dan efektif. Dengan membangun

dan mengelola infrastruktur TIK yang baik, kami telah mampu meningkatkan kualitas layanan kepada OPD sebagai client kami dengan memberikan *Service Level Agreement* (SLA) minimal 90% dari total performance dalam Triwulan tiap tahunnya.

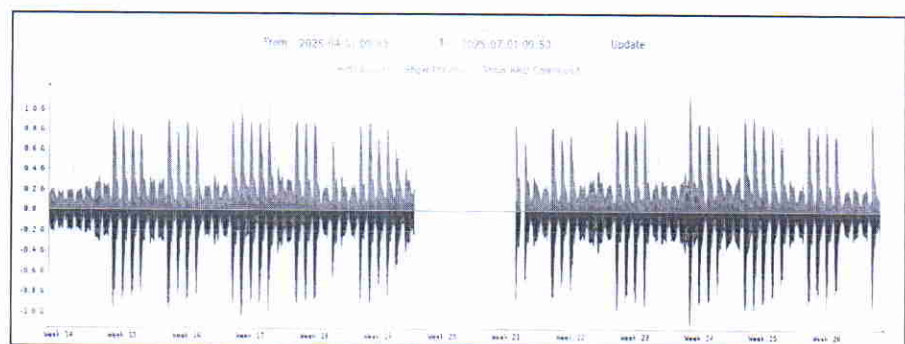
Gambar 2.3
Grafik koneksi internet di OPD



Gambar 2.4
Grafik koneksi internet di Kecamatan



Gambar 2.5
Grafik koneksi internet di Kelurahan



e. Persentase layanan publik secara elektronik

Layanan publik adalah segala jenis pelayanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Layanan publik ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, keamanan, dan lain sebagainya. Layanan publik dapat berupa penyediaan fasilitas, program-program pemerintah, atau pengaturan berbagai kegiatan untuk memastikan kepentingan masyarakat terpenuhi. Dalam banyak kasus, layanan publik juga mencakup kegiatan pengawasan dan pengaturan untuk memastikan bahwa layanan tersebut disediakan dengan standar yang sesuai dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.

Layanan publik elektronik adalah layanan publik yang disediakan secara elektronik melalui platform digital, seperti internet atau aplikasi mobile. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan aksesibilitas yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

Adapun beberapa keuntungannya, antara lain:

- 1) Aksesibilitas yang lebih baik: Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dari mana saja dan kapan saja selama memiliki akses internet.
- 2) Efisiensi: Proses administrasi dapat dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

- 3) **Transparansi:** Informasi mengenai layanan publik dapat disajikan secara transparan, memungkinkan masyarakat untuk memahami proses dan persyaratan yang dibutuhkan dengan lebih baik.
- 4) **Peningkatan partisipasi masyarakat:** Dengan memudahkan akses dan proses penggunaan, layanan publik elektronik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Namun, untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya, layanan publik elektronik juga perlu memperhatikan keamanan data pribadi, aksesibilitas bagi mereka yang tidak memiliki akses teknologi, serta dukungan teknis yang memadai.

Adapun untuk menentukan persentase layanan publik elektronik dengan rumus jumlah layanan publik elektronik dibagi jumlah layanan publik yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2.25
Persentase Layanan Publik Secara Elektronik
Kabupaten Temanggung sd. Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah layanan publik elektronik	na	na	na	66	69
2	Jumlah layanan publik yang ditetapkan	na	na	na	131	131
	Persentase	na	na	na	50,38	52,67

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2025 sudah dilaksanakan proses layanan publik secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Temanggung. Hingga sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tercatat ada 69 layanan publik yang sudah menerapkan system elektronik atau sebesar 52,67% dari jumlah layanan yang ditetapkan sebanyak 131 layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Tabel 2.26
Daftar Layanan Publik Yang Ditetapkan

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
1	Layanan pelaporan sms gateway	Sekretariat DPRD
2	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
3	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
4	Layanan perijinan	DPMPSTP
5	Layanan retribusi sampah	DPRKPLH
6	Layanan pengangkutan sampah	DPRKPLH
7	Surat Keterangan Terdaftar bagi Kelompok Tani	DKPP
8	Fasilitasi Penentuan Calon Lokasi Penanaman Bawang Putih bagi Importir Bawang Putih	DKPP
9	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	DKPP
10	Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)	DKPP
11	Penyewaan Gedung Graha Mina Bhakti Pasar Ikan Dangkel	DKPP
12	Penyewaan Guesthouse	DKPP
13	Penyewaan Mess / Penginapan	DKPP
14	Penyewaan Los Benih Ikan	DKPP
15	Penyewaan Los Ikan Konsumsi	DKPP
16	Penyewaan Kios	DKPP
17	Penjualan Ikan	DKPP
18	Bimbingan Teknis Perikanan	DKPP
19	Rekomendasi Teknis Kelompok Tani Ternak / Peternak	DKPP
20	Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan BAH	DKPP
21	Bantuan Vaksin, obat per-oral dan desinfektan	DKPP
22	Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Rabies)	DKPP
23	Tanggap cepat kejadian penyakit zoonosis (Avian Influenza);	DKPP

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
24	Jasa Pemotongan Hewan	DKPP
25	Pelayanan Inseminasi Buatan	DKPP
26	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	DKPP
27	Rekomendasi Perijinan Usaha Perikanan	DKPP
28	Rekomendasi Surat Izin Budidaya Ikan (SIUBI)	DKPP
29	Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP)	DKPP
30	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri	DKPP
31	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama	DKPP
32	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Klinik Hewan	DKPP
33	Rekomendasai Ijin tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Rumah sakit Hewan	DKPP
34	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Hewan Mandiri	DKPP
35	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktek Dokter Warga Negara Asing	DKPP
36	Rekomendasi Izin Praktek Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner	DKPP
37	Rekomendasi Ijin Melakukan Pelayanan Inseminasi Buatan	DKPP
38	Rekomendasi Ijin Usaha Peredaran Obat Hewan di depo Obat Hewan, Pet Shop dan Poultry Shop.	DKPP
39	Rekomendasi Ijin Usaha Peredaran Obat Hewan di toko Hewan	DKPP
40	Rekomendasi Izin Usaha Pemeotongan Hewan Ruminasia	DKPP
41	Rekomendasi Izin Usaha Pemotongan Unggas	DKPP
42	Rekomendasi Izin Jagal	DKPP
43	Rekomendasi Izin Menjual Daging	DKPP
44	Rekomendasi Izin Usaha Pemerahan Susu	DKPP
45	Rekomendasi Izin Menjual Susu Segar	DKPP
46	Rekomendasi Izin Usaha Produk Telur Unggas Konsumsi	DKPP

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
47	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan	DKPP
48	Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Salon Hewan	DKPP
49	Rekomendasi Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan	DKPP
50	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	DKPP
51	Rekomendasi Izin Usaha Pakan	DKPP
52	Rekomendasi Izin Perluasan Usaha Peternakan	DKPP
53	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas;	DKK
54	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Rumah Sakit;	DKK
55	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik	DKK
56	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Apotek;	DKK
57	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat;	DKK
58	Pelayanan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT)	DKK
59	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;	DKK
60	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Perawat;	DKK
61	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	DKK
62	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Bidan;	DKK
63	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Apoteker;	DKK
64	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	DKK
65	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;	DKK
66	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	DKK
67	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Radiografer;	DKK
68	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Fisioterapis;	DKK
69	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Elektromedik;	DKK
70	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Okupasi Terapi;	DKK
71	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Terapis Wicara;	DKK
72	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Refraksionis Optisien;	DKK
73	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Perekam Medis;	DKK

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
74	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Sanitarian;	DKK
75	Rekomendasi Izin Pelayanan Kerja Tenaga Gizi;	DKK
76	Pelayanan Perizinan Depot Air Minum;	DKK
77	Pelayanan Perizinan Jasa Boga;	DKK
78	Pelayanan Pendaftaran Penyehat Tradisional;	DKK
79	Pelayanan Rekomendasi Ambulans	DKK
80	Layanan Retribusi Pasar	Dinkopdag
81	Layanan Tera Metrologi	Dinkopdag
82	Layanan pesan perak	DPPPKBPA
83	Layanan Pengaduan Aplikasi	Dinkominfo
84	Layanan PPID	Dinkominfo
85	Layanan Data Statistik Temanggung	Dinkominfo
86	Layanan Retribusi Pajak	BPKPAD
87	Layanan PPDB	Dindikpora
88	Layanan Dapodik	Dindikpora
89	Layanan Kependudukan	Dindukcapil
90	Layanan Perijinan Paten	Kecamatan
91	Rawat Jalan	RSUD
92	Rawat Inap	RSUD
93	Layanan Penunjang Medis dan Non Public	RSUD
94	Layanan Kegawatdaruratan	RSUD
95	Layanan Kir Kendaraan	Dishub
96	Layanan Sanka	Dinsos
97	Layanan Data Kemiskinan	Dinsos
98	Layanan Data Pariwisata	Disbudpar
99	Layanan Pendataan Kesenian	Disbudpar
100	Tanda Daftar LPKS/BLK Komunitas	Dinperinaker
101	Ijin Operasional LPKS/BLK Komunitas	Dinperinaker
102	Rekomendasi Magang	Dinperinaker
103	Rekomendasi Pelatihan	Dinperinaker
104	Pendaftaran Kartu AK 1/Kartu Kuning	Dinperinaker
105	Verifikasi CPMI	Dinperinaker
106	Pengesahan perjanjian penempatan CPMI	Dinperinaker
107	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK)	Dinperinaker
108	Layanan Informasi Lowongan Kerja	Dinperinaker

No	Jenis Layanan Publik	Pemilik Layanan
109	Fasilitasi Rekrutmen tenaga kerja	Dinperinaker
110	Layanan Bimbingan Jabatan dan Penyuluhan jabatan	Dinperinaker
111	Konseling bagi penerima JKP	Dinperinaker
112	Validasi penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinperinaker
113	Fasilitasi Kasus Pekerja Migran	Dinperinaker
114	Unit Layanan Disabilitas	Dinperinaker
115	Pelayanan Pelatihan Produktivitas	Dinperinaker
116	Pelatihan industri	Dinperinaker
117	Fasilitasi Kemasan Fasilitasi pendaftaran merk	Dinperinaker
118	Rekomendasi keringan pendaftaran Merk	Dinperinaker
119	Verifikasi ijin usaha via OSS	Dinperinaker
120	Pendampingan Pendaftaran	Dinperinaker
121	Pencatatan Serikat Pekerja	Dinperinaker
122	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Dinperinaker
123	Fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dinperinaker
124	Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	Dinperinaker
125	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hubungan Industrial/Mediasi Kasus HI	Dinperinaker
126	Pendaftaran Perjanjian Jasa Pekerja	Dinperinaker
127	Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit	Dinperinaker
128	Permohonan ijin persetujuan bangunan gedung	DPUPR
129	Permohonan persetujuan kpr	DPUPR
130	Ijin pinjam sewa alat berat	DPUPR
131	layanan CMS bank pasar & BKK dengan Aplikasi Siskeudes	Dinpermades
Jumlah		131

Tabel 2.27
Daftar Layanan Publik Secara Elektronik

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
1	Layanan pelaporan sms gateway	Sekretariat Daerah
2	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat Daerah
3	Layanan Informasi produk Hukum	Sekretariat DPRD
4	Layanan perijinan	DPMPSTP
5	Layanan retribusi sampah	DPRKPLH
6	Layanan pengangkutan sampah	DPRKPLH

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
7	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	DKPP
8	Surat Keterangan Terdaftar bagi Kelompok Tani	DKPPP
9	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	DKPPP
10	Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)	DKPPP
11	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Puskesmas;	DKK
12	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Operasional Rumah Sakit;	DKK
13	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Izin Klinik	DKK
14	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Apotek;	DKK
15	Pelayanan Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Toko Obat;	DKK
16	Pelayanan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IRT)	DKK
17	Layanan Retribusi Pasar	Dinkopdag
18	Layanan Tera Metrologi	Dinkopdag
19	Layanan pesan perak	DPPPKBPA
20	Layanan Pengaduan Aplikasi	Dinkominfo
21	Layanan PPID	Dinkominfo
22	Layanan Data Statistik Temanggung	Dinkominfo
23	Layanan Retribusi Pajak	BPKPAD
24	Layanan PPDB	Dindikpora
25	Layanan Dapodik	Dindikpora
26	Layanan Kependudukan	Dindukcapil
27	Layanan Perijinan Paten	Kecamatan
28	Rawat Jalan	RSUD
29	Rawat Inap	RSUD
30	Layanan Penunjang Medis dan Non Public	RSUD
31	Layanan Kegawatdaruratan	RSUD
32	Layanan Kir Kendaraan	Dishub
33	Layanan Sanka	Dinsos
34	Layanan Data Kemiskinan	Dinsos
35	Layanan Data Pariwisata	Disbudpar
36	Layanan Pendataan Kesenian	Disbudpar

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
37	Pendaftaran Kartu AK 1/Kartu Kuning	Dinperinaker
38	Validasi penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinperinaker
39	Verifikasi ijin usaha via OSS	Dinperinaker
40	Pendampingan Pendaftaran SIINAS (Aplikasi SIINAS Kemenperin)	Dinperinaker
41	Permohonan ijin persetujuan bangunan gedung	DPUPR
42	Permohonan persetujuan kpr	DPUPR
43	Ijin pinjam sewa alat berat	DPUPR
44	layanan CMS bank pasar & BKK dengan Aplikasi Siskeudes	Dinpermades
45	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;	DKK
46	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Perawat;	DKK
47	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	DKK
48	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Bidan;	DKK
49	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Apoteker;	DKK
50	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	DKK
51	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;	DKK
52	Pelayanan Rekomendasi Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;	DKK
53	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Radiografer;	DKK
54	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Fisioterapis;	DKK
55	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Elektromedik;	DKK
56	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Okupasi Terapi;	DKK
57	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Terapis Wicara;	DKK
58	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Refraksionis Optisien;	DKK
59	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Perekam Medis;	DKK

No	Jenis Layanan Publik Secara Elektronik	Pemilik Layanan
60	Pelayanan Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Sanitarian;	DKK
61	Rekomendasi Izin Pelayanan Kerja Tenaga Gizi;	DKK
62	Pelayanan Perizinan Depot Air Minum;	DKK
63	Pelayanan Perizinan Jasa Boga;	DKK
64	Layanan Informasi Lowongan Kerja	Dinperinaker
65	Fasilitasi Rekrutmen tenaga kerja	Dinperinaker
66	Pelayanan Pelatihan Produktivitas	Dinperinaker
67	Pelatihan industri	Dinperinaker
68	Pencatatan Serikat Pekerja	Dinperinaker
69	Layanan Verifikasi CPMI	Dinperinaker
Jumlah		69

f. Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Data Statistik Sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Temanggung melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 050/494 Tahun 2024 tentang Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2025 telah menetapkan daftar data yang menjadi prioritas untuk dipenuhi dalam rangka Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut ditetapkan 314 data prioritas yang berasal dari 32 Produsen Data.

Rumus untuk menghitung Ketersediaan Data Statistik Sektoral sebagai berikut:

Ketersediaan Data Statistik Sektoral

$$= \frac{\text{Jumlah Data yang Dikelola}}{\text{Jumlah Data Prioritas yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Dinkominfo Kabupaten Temanggung memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola data statistik sektoral. Pengumpulan data ini dilakukan tiga kali dalam setahun untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia selalu akurat dan terkini.

Setelah data dikumpulkan, Dinkominfo menyusun publikasi dalam bentuk cetak dan digital, dan melakukan diseminasi melalui berbagai kanal untuk memudahkan akses publik. Ini termasuk distribusi dalam bentuk buku, soft copy, aplikasi Android, melalui laman SDI Kabupaten Temanggung yaitu data.temanggungkab.go.id, serta laman temandata.temanggungkab.go.id. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses data yang relevan.

Buku Statistik Kabupaten Temanggung menerbitkan data statistik sektoral yang mencakup informasi dari tahun sebelumnya (n-1), sehingga masyarakat dapat melihat gambaran umum perkembangan wilayah. Sementara itu, laman data.temanggungkab.go.id menyediakan data statistik tahun berjalan yang diperbarui setiap semester. Dengan demikian, masyarakat dapat mengikuti perkembangan terbaru dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat.

Tabel 2.28
Ketersediaan Data Statistik Sektoral
Sd. Triwulan II Tahun 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah data yang dikelola	na	na	na	215	233
2	Jumlah data prioritas yang ditetapkan	na	na	na	215	314
	Persentase	na	na	na	100	74,20

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2025 sampai Triwulan II ketersediaan data statistik sektoral mencapai 74,20%, yang berarti masih ada 81 data prioritas yang ditetapkan belum tersedia yaitu dari data geospasial. Data yang belum tersedia tersebut akan diproses oleh produsen data dan diverifikasi oleh Dinkominfo untuk dapat tersedia melalui laman Geoportal Temanggung.

Tabel 2.29
Data Prioritas Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
1	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern <i>Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</i>	√		DPPPAPPKB
2	Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan	√		DPPPAPPKB
3	Indeks Kualitas Data dan Informasi Program Bangga Kencana	√		DPPPAPPKB
4	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	√		DPPPAPPKB
5	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi	√		DPPPAPPKB
6	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang	√		DPPPAPPKB

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
	menggunakan kontrasepsi modern			
7	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka	√		DPPPAPPKB
8	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) wanita	√		DPPPAPPKB
9	Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB	√		DPPPAPPKB
10	Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	√		DPPPAPPKB
11	Persentase pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need)	√		DPPPAPPKB
12	Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	√		DPPPAPPKB
13	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi/ <i>Discontinuation of Contraceptive Rate</i> (DCR) 12 bulan	√		DPPPAPPKB
14	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	√		BNN
15	Jumlah Kerugian nominal akibat bencana alam	√		BPBD
16	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	√		BPBD
17	Indeks Risiko Bencana Indonesia	√		BPBD
18	Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multiancam bencana	√		BPBD
19	Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pascabencana	√		BPBD
20	Jumlah dan jenis peralatan dan logistik kebencanaan yang sesuai standar	√		BPBD
21	Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana	√		BPBD

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
22	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana per kota	√		BPBD
23	Jumlah korban meninggal akibat bencana	√		BPBD
24	Jumlah produk hukum daerah untuk regulasi dan tata kelola penanggulangan bencana	√		BPBD
25	Jumlah dokumen tata kelola penanggulangan bencana	√		BPBD
26	Jumlah sistem kebencanaan yang dikembangkan	√		BPBD
27	Jumlah Sistem Mitigasi Multiancamn Bencana (MHEWS) terpadu	√		BPBD
28	Jumlah sosialisasi pengurangan risiko bencana	√		BPBD
29	Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	√		BPBD
30	Indeks Ketahanan Pangan	√		DKPPP
31	Persentase daerah rentan rawan pangan	√		DKPPP
32	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	√		Bankesbang ol
33	Data Audit, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pemerintah Daerah	√		Inspektorat
34	Jumlah laporan rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan	√		BPKPAD
35	Data pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern badan usaha milik daerah	√		Sekretariat Daerah
36	Garis kemiskinan	√		Badan Pusat Statistik
37	Jumlah dan jenis penyakit yang ditangani Kabupaten Temanggung	√		Dinkes
38	Harapan Lama Sekolah	√		Badan Pusat Statistik
39	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	√		Badan Pusat Statistik
40	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	√		Badan Pusat Statistik
41	Indeks Pembangunan Manusia	√		Badan Pusat Statistik

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
42	Indeks Pembangunan Manusia per jenis kelamin	√		Badan Pusat Statistik
43	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	√		Badan Pusat Statistik
44	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	√		Badan Pusat Statistik
45	Jumlah Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah	√		BPKPAD
46	Laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu tahunan	√		Badan Pusat Statistik
47	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut provinsi/kabupaten/kota	√		Badan Pusat Statistik
48	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	√		Badan Pusat Statistik
49	Persentase angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi	√		Badan Pusat Statistik
50	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	√		Sekretariat DPRD
51	Persentase penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir	√		Badan Pusat Statistik
52	Persentase Penduduk umur 10-18 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir	√		Badan Pusat Statistik
53	Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir	√		Badan Pusat Statistik
54	Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang mempunyai nomor induk kependudukan	√		Dindukcapil
55	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	√		Badan Pusat Statistik
56	Persentase Perempuan Pernah Kawin (PPK) 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup (ALH) dalam dua tahun terakhir dan kelahiran ALH yang terakhirnya di fasilitas kesehatan	√		Badan Pusat Statistik
57	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	√		Badan Pusat Statistik
58	Indeks Daya Saing Daerah	√		Bappeda

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
59	Jumlah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	√		Kementerian Agama
60	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal	√		Kementerian Agama
61	Jumlah event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan sikap toleran yang difasilitasi	√		Kementerian Agama
62	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hittaya sukhaya (keluarga)	√		Kementerian Agama
63	Jumlah sarana peribadatan yang difasilitasi (unit)	√		Kementerian Agama
64	Jumlah guru pada tingkat pendidikan RA/MI/MTS/MA/MAK/ sederajat yang memiliki sertifikat pendidik	√		Kementerian Agama
65	Jumlah guru pendidikan agama di sekolah yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	√		Kementerian Agama
66	Persentase guru pendidikan agama yang mendapatkan pembinaan	√		Kementerian Agama
67	Jumlah jemaah haji	√		Kementerian Agama
68	Jumlah kasus konflik intra umat beragama yang diselesaikan	√		Kementerian Agama
69	Jumlah lembaga agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	√		Kementerian Agama
70	Jumlah lembaga ekonomi umat berbasis zakat dan wakaf yang mendapat pembinaan	√		Kementerian Agama
71	Jumlah pesantren yang berwawasan moderat	√		Kementerian Agama
72	Jumlah petugas haji profesional	√		Kementerian Agama
73	Jumlah rumah ibadah yang ramah	√		Kementerian Agama

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
74	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP (persen)	√		Kementerian Agama
75	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	√		Kementerian Agama
76	Indeks Inovasi Daerah	√		Bappeda
77	Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah	√		Sekretariat Daerah
78	Jumlah Desa dan Kelurahan beserta kodenya	√		Dinpermades
79	Jumlah Desa yang Datanya Terpublikasi Secara Online	√		Dinkominfo
80	Jumlah desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	√		Dinpermades
81	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	√		Bappeda
82	Jumlah pedoman/kebijakan/SOP penyelenggaraan administrasi kependudukan yang disusun	√		Dindukcapil
83	Jumlah Bangunan dan Gedung yang memiliki IMB	√		DPMPSTSP
84	Jumlah Penerimaan Daerah	√		BPKPAD
85	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik	√		DPMPSTSP
86	Jumlah RT/RW dan Dusun	√		Dinpermades
87	Luas Penetapan LP2B (Perda, Peraturan Bupati/Walikota, SK Bupati/Walikota)	√		DKPPP
88	Luas wilayah Desa dan Kelurahan	√		Dinpermades
89	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	√		Bappeda
90	Jumlah akta kematian dari peristiwa kematian yang diterbitkan	√		Dindukcapil

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
91	Jumlah akta perceraian pada semua individu yang diterbitkan	√		Pengadilan Agama
92	Jumlah kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	√		Kementerian Agama
93	Persentase capaian SPM	√		Dinkominfo
94	Indeks Desa Membangun 2024	√		Dinpermades
95	Jumlah BUMDesa dan BUMDesa Bersama	√		Dinpermades
96	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Ditempatkan di Kawasan Transmigrasi	√		Dinpermades
97	Jumlah Masyarakat Desa yang Diberi Pelatihan berdasarkan Jenis Pelatihan Tahun 2025	√		Dinperinaker
98	Jumlah tenaga kerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	√		Dinperinaker
99	Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama	√		Dinpermades
100	Nilai Omset BUMDesa/ BUMDesa Bersama	√		Dinpermades
101	Peringkat BUMDes	√		Dinpermades
102	Jumlah perikanan hasil budidaya	√		DKPPP
103	Jumlah perikanan hasil tangkapan	√		DKPPP
104	Jumlah Produksi Berdasarkan Komoditas Ikan Utama	√		DKPPP
105	Jumlah produksi hasil Perikanan Tangkap dan Budidaya	√		DKPPP
106	Jumlah Produksi ikan	√		DKPPP
107	Pagu dan Realisasi Penyaluran Dana Desa	√		Dinpermades
108	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform	√		Dinkominfo
109	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	√		Dinkominfo

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
110	Jumlah peserta pelatihan digital skill untuk menuju ekonomi digital	√		Dinkominfo
111	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan	√		Dinkopdag
112	Jumlah Koperasi yang memiliki Badan Hukum Koperasi	√		Dinkopdag
113	Jumlah KSP yang mendapatkan Perizinan Berusaha	√		Dinkopdag
114	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan jenis kelamin Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	√		Dinkopdag
115	Jumlah tenaga kerja di UMKM berdasarkan skala usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	√		Dinkopdag
116	Jumlah UMKM berdasarkan bentuk usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	√		Dinkopdag
117	Jumlah UMKM berdasarkan sektor usaha, tenaga kerja, aset-omzet, dan Skala Usaha Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	√		Dinkopdag
118	Jumlah UMKM Hasil Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	√		Dinkopdag
119	Jumlah UMKM yang termasuk Kelompok/Klaster Usaha Mikro Unggulan yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Kapasitas Usaha	√		Dinkopdag
120	Jumlah wirausaha yang menerima fasilitasi pendampingan usaha	√		Dinkopdag
121	Indeks kualitas udara	√		DPRKPLH
122	Jumlah dokumen lingkungan untuk keperluan berusaha	√		DPRKPLH

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
123	Jumlah destinasi pariwisata yang ditingkatkan aksesibilitas, prasarana pendukung, dan atraksi	√		Dinbudpar
124	Jumlah diklat pemasaran digital	√		Dinkominfo
125	Nilai ekspor ekonomi kreatif	√		Dinkopdag
126	Jumlah embung, situ, danau dan kolam retensi Indonesia	√		DPUPR
127	Jumlah Irigasi	√		DPUPR
128	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembuangan Akhir	√		DPRKPLH
129	Jumlah Mata Air	√		DPUPR
130	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	√		DPRKPLH
131	Jumlah penyediaan air minum yang dikelola oleh masyarakat	√		DPUPR
132	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	√		Perumda Air Minum Tirta Agung
133	Data jumlah saluran irigasi dalam keadaan rusak	√		DPUPR
134	Luas lahan irigasi berdasarkan jenisnya	√		DPUPR
135	Panjang jalan berdasarkan kategori kondisi baik dan sedang	√		DPUPR
136	Presentase dan Kondisi Kemantapan Jalan	√		DPUPR
137	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	√		DPPPAPPKB
138	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	√		DPPPAPPKB
139	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	√		DPPPAPPKB
140	Jumlah fasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpik	√		Dindikpora
141	Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpik yang memenuhi standar minimal keolahragaan	√		Dindikpora
142	Jumlah tenaga keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang bersertifikasi	√		Dindikpora

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
143	Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Kab/Kota	√		Inspektorat
144	Rasio Tenaga Pendidikan Indeks Pemerataan Guru	√		Dindikpora
145	Jumlah guru di jenjang PAUD/ sederajat, TK/ sederajat, SD/ sederajat, dan SMP/ sederajat berdasarkan status kepegawaian	√		Dindikpora
146	Persentase guru dan tenaga kependidikan berdasarkan jenjang pendidikan	√		Dindikpora
147	Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	√		Dindikpora
148	Jumlah satuan pendidikan yang sudah memiliki sambungan internet	√		Dindikpora
149	Jumlah pasar tradisional/rakyat	√		Dinkopdag
150	Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian	√		DKPPP
151	Jumlah bantuan pupuk organik yang disalurkan	√		DKPPP
152	Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani	√		DKPPP
153	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian atau Pangan	√		DKPPP
154	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor hortikultura	√		DKPPP
155	Jumlah produksi komoditas pertanian sektor perkebunan	√		DKPPP
156	Produktivitas komoditas pertanian sektor hortikultura	√		DKPPP
157	Produktivitas komoditas pertanian sektor perkebunan	√		DKPPP
158	Luas areal komoditas pertanian sektor perkebunan	√		DKPPP
159	Luas lahan pertanian beririgasi permanen	√		DKPPP
160	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	√		DKPPP
161	Luas Panen Komoditas Pertanian	√		DKPPP
162	Luas panen komoditas pertanian sektor hortikultura	√		DKPPP

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
163	Luas Tanam Komoditas Pertanian	√		DKPPP
164	Luas Total Lahan Pertanian Pangan	√		DKPPP
165	Indeks Integritas Instansi	√		KPK
166	Nilai Bulanan Monitoring Pengadaan Barang Jasa yang Tercatat di Sistem LKPP	√		Sekretariat Daerah
167	Nilai Bulanan Pencadangan PDN dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)	√		Sekretariat Daerah
168	Nilai Bulanan Pencadangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)	√		Sekretariat Daerah
169	Nilai Transaksi Bulanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	√		Sekretariat Daerah
170	Skor Hasil Penilaian Ombudsman RI terkait Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung	√		Bappeda
171	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	√		Dinpusip
172	Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	√		Dinpusip
173	Jumlah Pojok Baca Digital di daerah	√		Dinpusip
174	Tingkat Kemiskinan	√		Badan Pusat Statistik
175	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	√		DKPPP
176	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	√		DKPPP
177	Usia Harapan Hidup (UHH)	√		Badan Pusat Statistik
178	Jumlah Kasus Kematian Ibu	√		Dinkes
179	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	√		Dinkes
180	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	√		Dinkes

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
181	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	√		Dinkes
182	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	√		Dinkes
183	Presentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) :	√		Dindikpora
184	A) Literasi Membaca SD/Sederajat	√		Dindikpora
185	B) Literasi Membaca SMP/Sederajat	√		Dindikpora
186	C) Numerasi SD/Sederajat	√		Dindikpora
187	D) Numerasi SMP/Sederajat	√		Dindikpora
188	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	√		Badan Pusat Statistik
189	Harapan Lama Sekolah	√		Badan Pusat Statistik
190	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	√		Badan Pusat Statistik
191	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	√		Badan Pusat Statistik
192	Presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	√		Dindikpora
193	Presentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	√		Dinbudpar
194	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	√		Dinbudpar
195	Presentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 (satu) tahun terakhir	√		Dinbudpar
196	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	√		Dinpusip
197	Jumlah kejadian konflik SARA	√		Bankesbangol
198	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	√		DPPPAPPKB

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
199	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	√		Badan Pusat Statistik
200	Rasio PDRB Industri Pengolahan	√		Badan Pusat Statistik
201	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	√		Badan Pusat Statistik
202	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	√		Dinbudpar
203	Rasio Kewirausahaan Daerah	√		Badan Pusat Statistik
204	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	√		Badan Pusat Statistik
205	Return on Aset (ROA) BUMD	√		Sekretariat Daerah
206	Disparitas harga / Koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi	√		Dinkopdag
207	Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	√		Badan Pusat Statistik
208	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	√		Badan Pusat Statistik
209	Total dana pihak ketiga pada bank milik Kabupaten Kota/PDRB	√		Sekretariat Daerah
210	Total kredit pada bank milik Kabupaten Kota/PDRB	√		Sekretariat Daerah
211	Kapabilitas Inovasi	√		Bappeda
212	Presentase Desa Mandiri	√		Dinpermades
213	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	√		Badan Pusat Statistik
214	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	√		DPPPPAPPKB
215	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	√		Dinperinaker
216	Presentase rumah tangga dengan akses internet	√		Dinkominfo
217	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	√		Badan Pusat Statistik
218	Presentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan Kabupaten/Kota	√		Dinhub
219	Presentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	√		Dinhub

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
220	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	√		Dinas Sosial
221	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	√		Badan Pusat Statistik
222	Indeks Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	√		DPUPR
223	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	√		DPRKPLH
224	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	√		DPRKPLH
225	Indeks Risiko Bencana (IRB)	√		BPBD
226	Penurunan Emisi GRK	√		DPRKPLH
227	Indeks Reformasi Birokrasi	√		Sekretariat Daerah
228	Indeks Reformasi Hukum	√		Sekretariat Daerah
229	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	√		Dinkominfo
230	Indeks Pelayanan Publik	√		Sekretariat Daerah
231	Indeks Integritas Nasional	√		Inspektorat
232	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	√		Badan Pusat Statistik
233	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	√		Badan Pusat Statistik
234	Peta Batas Administrasi Kabupaten		√	Sekretariat Daerah
235	Peta Toponimi		√	Sekretariat Daerah
236	Peta Sebaran BUMD Kabupaten		√	Sekretariat Daerah
237	Peta Sebaran Tanah Aset Pemda		√	BPKPAD
238	Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB)		√	BPBD
239	Peta Jalur dan Ruang Evaluasi Bencana		√	BPBD
240	Peta Lokasi Pariwisata		√	Dinbudpar
241	Peta sebaran Desa Wisata		√	Dinbudpar
242	Peta Sebaran hotel berbintang		√	Dinbudpar
243	Peta Sebaran Usaha Pariwisata		√	Dinbudpar
244	Peta Lokasi Cagar Budaya		√	Dinbudpar
245	Peta Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi		√	Dinbudpar

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
246	Peta Klinik		√	Dinkes
247	Peta PuskeSMAs		√	Dinkes
248	Peta Rumah Sakit		√	Dinkes
249	Peta Cakupan Coverage Siaran TV Digital LPPL Temanggung TV dan Radio Erte FM		√	Dinkominfo
250	Peta Jaringan Fiber Optik		√	Dinkominfo
251	Peta Lokasi Radio		√	Dinkominfo
252	Peta Lokasi Stasiun TV		√	Dinkominfo
253	Peta Titik Lokasi yang di layani internet desa		√	Dinkominfo
254	Peta Sebaran Kantor Koperasi		√	Dinkopdag
255	Peta Sebaran Pasar Modern		√	Dinkopdag
256	Peta Sebaran Pasar Rakyat		√	Dinkopdag
257	Peta Sebaran UKM		√	Dinkopdag
258	Peta Lokasi Industri, Perdagangan dan Jasa		√	Dinkopdag
259	Data Sebaran BUMDes		√	Dinpermades
260	Peta Batas Administrasi Desa		√	Dinpermades
261	Peta Aset Desa		√	Dinpermades
262	Peta Sebaran Sarana Olahraga		√	Dindikpora
263	Titik Lokasi Sekolah		√	Dindikpora
264	Titik Lokasi Siswa		√	Dindikpora
265	Peta Jaringan transportasi Angkutan Umum Masal di Wilayah Aglomerasi Perkotaan		√	Dinhub
266	Peta Prasarana Transportasi Darat, Laut, dan Udara		√	Dinhub
267	Peta Jalur Pejalan Kaki dan Sepeda		√	Dinhub
268	Peta Lokasi Parkir on street dan off street		√	Dinhub
269	Peta Kondisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Ruas Jalan Kabupaten		√	Dinhub
270	Peta Kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum di Ruas Jalan Kabupaten		√	Dinhub
271	Peta Kondisi Rambu di Ruas Jalan Kabupaten		√	Dinhub
272	Peta Kondisi Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan di Ruas Jalan Kabupaten		√	Dinhub

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
273	Peta Persebaran Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Jalan Kabupaten		√	Dinhub
274	Balai pelatihan dan jenis pelatihannya		√	Dinperinaker
275	Peta Lokasi Industri		√	Dinperinaker
276	Peta Pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tahunan)		√	Dinas Sosial
277	Peta Sebaran Kube		√	Dinas Sosial
278	Data irigasi (sesuai kewenangan pertanian)		√	DKPPP
279	Data ProdUKSi Perikanan		√	DKPPP
280	Data pupuk sesuai dengan pedoman kementan (peraturan kementan)		√	DKPPP
281	Peta produktivitas pertanian		√	DKPPP
282	Peta Lahan Baku Sawah		√	DKPPP
283	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		√	DKPPP
284	Peta Sebaran Kawasan Peternakan		√	DKPPP
285	Peta sebaran komoditas perkebunan		√	DKPPP
286	Peta sebaran lokasi Puskesmas		√	DKPPP
287	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		√	DKPPP
288	Peta Peluang Investasi		√	DPMPTSP
289	Peta Sebaran Investasi		√	DPMPTSP
290	Peta Sebaran Perizinan		√	DPMPTSP
291	Peta Sebaran RTH di Kabupaten Temanggung		√	DPRKPLH
292	Peta Hutan Rakyat		√	DPRKPLH
293	Peta Sebaran Pengelolaan Limbah Industri		√	DPRKPLH
294	Peta Existing Kawasan Permukiman Kumuh		√	DPRKPLH
295	Sebaran Lokasi Rusunawa		√	DPRKPLH
296	Peta Sebaran Tipologi Perumahan		√	DPRKPLH
297	Peta Jaringan Persampahan		√	DPRKPLH
298	Peta Sebaran Ruang Terbuka Non Hijau		√	DPRKPLH
299	Peta Titik Pemantauan Kualitas Udara dan Kualitas Air		√	DPRKPLH
300	Peta potensi rawan kebakaran		√	Satpol PP Damkar

No.	Data Prioritas yang Ditetapkan	Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Produsen Data
301	Peta Tingkat Potensi Rawan Trantib		√	Satpol PP Damkar
302	Peta Lokasi Kantor Pemerintahan		√	Dinkominfo
303	Jaringan Jalan		√	DPUPR
304	Peta sebaran lokasi embung		√	DPUPR
305	Peta RTRW Kabupaten Temanggung		√	DPUPR
306	Peta Tematik RTRW Kabupaten		√	DPUPR
307	Peta Izin Pemanfaatan Ruang		√	DPUPR
308	Peta Intensitas dan Tata Bangunan Eksisting		√	DPUPR
309	Peta Guna Bangunan Eksisting		√	DPUPR
310	Peta Hidrologi (Sumber Daya Air Permukaan)		√	DPUPR
311	Peta Batas Daerah Aliran Sungai (DAS)		√	DPUPR
312	Peta Jaringan Sumber Daya Air		√	DPUPR
313	Peta Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten		√	DPUPR
314	Peta Sebaran lokasi pengendali banjir Kabupaten		√	DPUPR

Dengan data statistik yang lengkap dan terbaru, pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini, seperti pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum, dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang tersedia.

g. Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi

Penilaian resiko keamanan informasi adalah indeks untuk mengukur kematangan dan kesiapan perangkat daerah dalam menanggulangi ancaman terhadap gangguan ataupun hambatan yang dapat mengganggu Keamanan Informasi di lingkup pemerintah daerah yang dalam penilaiannya menggunakan form ataupun tools yang disebut Indeks KAMI.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan dari aspek kelengkapan maupun kematangan kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembandingan dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian bisa digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders).

Khusus untuk Instansi Pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus

menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Pertukaran informasi dan diskusi dengan Instansi pemerintah lainnya sebagai bagian dari penggunaan alat evaluasi Indeks KAMI ini juga menciptakan alur komunikasi antar pengelola keamanan informasi di sektor pemerintah sehingga semua pihak dapat mengambil manfaat dari lesson learned yang sudah dilalui.

Alat evaluasi Indeks KAMI ini dapat digunakan oleh organisasi dengan skala nasional, maupun yang berukuran kecil. Penggunaan di Instansi pemerintah dapat dilakukan di tingkat pusat maupun satuan kerja yang ada di tingkatan Direktorat Jenderal, Badan, Pusat atau Direktorat untuk mendapatkan gambaran mengenai kematangan program kerja keamanan informasi yang dijalankannya. Evaluasi ini dianjurkan untuk dilakukan oleh pejabat yang secara langsung bertanggungjawab dan berwenang untuk mengelola keamanan informasi di seluruh cakupan instansinya.

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area sebagai berikut:

- 1) Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi
- 2) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 5) Pengelolaan Aset Informasi, dan
- 6) Teknologi dan Keamanan Informasi

Dan ditambah dengan Suplemen yaitu Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan (*Cloud Service*) dan Perlindungan Data Pribadi.

Pertanyaan yang ada belum tentu dapat dijawab semuanya, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah

jawaban yang diberikan harus merefleksikan kondisi penerapan keamanan informasi sesungguhnya. Alat evaluasi ini hanya akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak apabila pengisiannya menggunakan azas keterbukaan dan kejujuran.

Penggunaan aplikasi Indek KAMI ini bisa dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah daerah dan kemudian untuk verifikasi dari nilai yang didapatkan akan diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi yang berwenang untuk menilai tingkat Kematangan Keamanan Informasi tersebut.

Tabel 2.30
Persentase Penilaian Resiko Keamanan Informasi

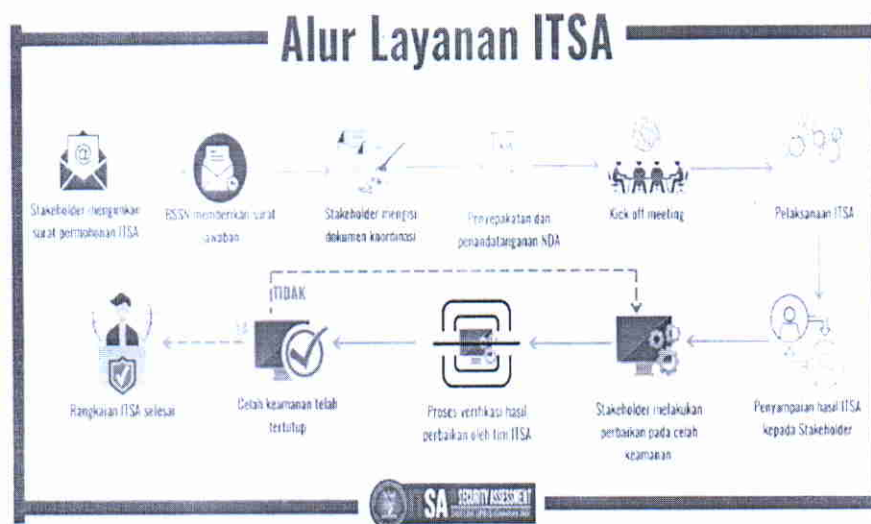
No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*
1	Hasil nilai per area Indeks KAMI	na	na	na	263	263
2	Target indeks KAMI yang ditetapkan	na	na	na	300	300
	Persentase	na	na	na	87,67	87,67

Hasil nilai indek KAMI tahun 2025 masih menggunakan perolehan nilai indek KAMI tahun 2024, karena tahun 2025 belum dilaksanakan asesmen.

h. Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi Pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan melaksanakan ITSA (Information Technology Security Assesment) yang digunakan untuk pengujian kerentanan, pemberian saran dan rekomendasi

pengamanan untuk meminimalisir celah kerawanan yang terdapat dalam suatu sistem informasi. ITSA dilaksanakan oleh BSSN dengan prosedur sebagai berikut:



Gambar 2.7
Alur Layanan ITSA

Dikarenakan keterbatasan kuota ITSA yang dapat dilaksanakan oleh BSSN maka Pemerintah Daerah dapat Melaksanakan secara mandiri pengujian ITSA tersebut dengan syarat sudah mempunyai personil yang memiliki kualifikasi sebagai Pentester dan mempunyai sertifikasi. Untuk pemerintah Kabupaten Temanggung sudah mempunyai 1 orang yang dapat melakukan pengujian tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan instansi Pembina yaitu BSSN. Dan untuk tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada maka tetap dibutuhkan untuk setiap saat mengupdate kemampuan yang dimiliki oleh personil pentester tersebut.

Dari semua aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung tentunya tidak dapat untuk dapat dilakukan pengujian semua aplikasi tersebut, sehingga untuk pengujian dapat dilakukan dengan target

pengujian 17 aplikasi per tahun, dan apabila ada aplikasi yang baru dibuat atau diupdate tentunya tetap akan dilaksanakan pengujian ulang.

Tabel 2.34
Persentase Pelaksanaan Prosedur Pengamanan Informasi
Pada Perangkat Daerah

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah aplikasi yang sudah dilakukan VA	na	na	na	17	6
2	Jumlah target aplikasi yang akan dilaksanakan	na	na	na	15	17
	Persentase				113%	35,29 %

Tabel 2.35
Aplikasi yang sudah dilakukan Vulnerability Assesment
(VA) Tahun 2024

No	Uraian	Pelaksanaan VA Sudah/ belum	Kategori Bug
1	soropadan-pringsurat.temanggungkab.go.id	Sudah	Critical
2	ukpbj.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
3	wonoboyo.temanggungkab.go.id	Sudah	Low
4	Sipemdes.temanggungkab.go.id	Sudah	Medium
5	ebphtb.temanggungkab.go.id	sudah	Medium
6	temandata.temanggungkab.go.id	Sudah	Low

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinkominfo dimana terdapat indikator program yang belum mencapai target Renstra 2024-2026, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dan isu penting berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkominfo yang mencakup beberapa aspek penting terkait dengan transformasi digital, pengelolaan data, pengelolaan informasi komunikasi publik, penyediaan data statistik, dan keamanan informasi. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinkominfo secara garis besar antara lain:

1. Masih ada gap dalam pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi utamanya akses internet dan jaringan sinyal di area perkotaan dan pedesaan;
2. Masih adanya wilayah blank spot atau wilayah yang belum terjangkau pelayanan komunikasi dan informatika;
3. Masih banyak aplikasi dari pemerintah pusat yang mengelola data secara tertutup sehingga menyulitkan integrasi data, serta layanan data dan informasi dilingkup Kabupaten Temanggung;
4. Komunikasi dan Informasi Publik belum efektif dan terorganisir dengan baik;
5. Tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik belum terintegrasi dengan baik;
6. Akses Informasi masih belum merata sampai ke seluruh desa;
7. Masih maraknya narasi negatif, hoax, dan informasi *misleading* yang beredar di Masyarakat;
8. Tata kelola data belum optimal sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;
9. Pembangunan metadata statistik sektoral belum optimal.
10. Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Temanggung belum terkelola dengan baik.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka dalam urusan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renja tahun 2026 antara lain:

1. Penguatan ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK.
2. Pengoptimalan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi.
3. Penyiapan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan keterbukaan informasi.
4. Optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral.
5. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
6. Mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan pengawasan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Dinkominfo sejumlah 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, yang bersumber dari dana DBHCHT.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.36
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						I	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika						
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	%	4.731.564.823	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	%	6.894.760.901	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan		100	%	4.051.189.764	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan		100	%	4.051.189.764	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	35	Orang/ bulan	4.051.189.764		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	40	Orang/ bulan	4.051.189.764	DAU
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian		100	%	-	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian		100	%	745.009.000	
						-		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Kab. Temanggung	7000	orang	745.009.000	Sumber dana DBHCHT
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum		100	%	201.092.400	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum		100	%	230.757.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	6	paket	4.992.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	4	paket	4.988.500	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	4	paket	71.617.400		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	4	paket	60.907.600	DAU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	paket	10.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor yang Disediakan		3	paket	50.515.000	DAU

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	3	paket	22.001.000	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	6	paket	22.000.000	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	paket	9.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	paket	9.500.000	DAU
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	laporan	27.982.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	laporan	27.982.000	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	laporan	55.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	laporan	54.864.000	DAU
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang		100	%	262.789.159	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang		100	%	1.704.634.037	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	laporan	560.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	laporan	560.000	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	7.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	7.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	14.012.400		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	14.008.800	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	241.216.759		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	1.683.065.237	DAU
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang siap pakai		100	%	216.493.500	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang siap pakai		100	%	163.171.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Temanggung	26	unit	216.493.500		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Kab. Temanggung	26	unit	163.171.000	DAU

ANALISA KEBUTUHAN														
RANCANGAN AWAL RKPD 2026														
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif 2. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik 3. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo		100	%		B	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif 2. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik 3. Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo		100	%	505.000.000	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik		12	dokum en	530.000.000	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik				505.000.000	
	Diseminasi Informasi			12	dokum en	530.000.000		Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik		20	Persen	65.000.000	DAU
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Temanggung	52	media	90.000.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kab. Temanggung	52	media	440.000.000	DAU
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik 2. Persentase layanan publik secara elektronik		100	%	2.205.719.357	C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1. Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik 2. Persentase layanan publik secara elektronik		100	%	1.780.719.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2026														ANALISA KEBUTUHAN						
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			106	unit	250.000.000	2	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					220.000.000							
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	2	dokumen	250.000.000		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	2	dokumen	220.000.000	DAU						
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.955.719.357		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.560.719.000							
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	46	PD	1.535.719.357		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kab. Temanggung	46	PD	1.480.119.000	DAU						
	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Temanggung	3	dokumen	420.000.000		Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab. Temanggung	3	dokumen	80.600.000	DAU						
II	Usuran Pemerintahan Bidang Statistik					180.000.000	II	Usuran Pemerintahan Bidang Statistik					30.000.000							
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral				180.000.000	D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Statistik Sektoral				30.000.000							
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral Kabupaten Temanggung				180.000.000	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral Kabupaten Temanggung				30.000.000							

RANCANGAN AWAL RKPD 2026							ANALISA KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Temanggung		dokumen	180.000.000		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Temanggung	100	%	30.000.000	DAU
III	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian					405.000.000	III	Usuran Pemerintahan Bidang Persandian					334.999.600	
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Persentase penilaian resiko keamanan informasi 2. Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah		100	%	405.000.000	E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Persentase penilaian resiko keamanan informasi 2. Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah		100	%	334.999.600	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi		46	OPD	405.000.000	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Jumlah laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi				334.999.600	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Temanggung	2	Laporan /tahun	350.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Temanggung	12	laporan	300.000.000	DAU
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Temanggung	46	PD	55.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab. Temanggung	46	PD	34.999.600	DAU
	JUMLAH					8.052.284.180		JUMLAH					9.545.479.501	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Mustenberg RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Dinkominfo. Namun dalam proses ini Dinkominfo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinkominfo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Program dan kegiatan yang diusulkan dari aspirasi masyarakat kepada Dinkominfo tahun 2026 yang bersifat spesifik tidak ada usulan.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinkominfo ada 12 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2025

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Layanan Zoom Meeting & Cloud drive after pandemi	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Langganan Zoom meeting untuk masing - masing OPD dengan multi participant (max 100 participant) & pembuatan cloud drive untuk penyimpanan data	2 Akun Zoom berlisensi cloud.temanggungkab.go.id	1. Kemudahan dalam setiap rapat virtual antar instansi dan OPD dimasa pandemi, karena keterbatasan ruang & waktu ketika pandemi. 2. Kemudahan penyimpanan data yang bisa di upload dan di download kapan saja dimana saja tanpa harus membawa alat penyimpanan.	2021
2	Aplikasi E-Office	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi eoffice	aplikasi eoffice web	Kemudahan dalam proses surat menyurat secara elektronik	2022
3	SID Terintegrasi	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi SID terintegrasi	aplikasi SID untuk masing masing desa	Kemudahan perangkat desa dalam mengelola data pemerintah Desa dan layanan pemerintahan desa	2023

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
4	GIS Temanggungkab	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi GIS terintegrasi	Aplikasi GIS Terintegrasi	Kemudahan untuk penyajian data yang terintegrasi oleh beberapa aplikasi eksisting baik kemiskinan, pemerintahan, kepegawaian, kesehatan dan ekonomi yang bermanfaat sebagai sumber informasi dan analisis pengambilan kebijakan	2024
5	PMT	Dinkominfo Kab Temanggung	APBD	Pembuatan aplikasi PMT pengendalian menara	Aplikasi PMT	Kemudahan permohonan rekomendasi pengajuan menara baru atau pengajuan ijin menara yang sudah existing berdasarkan Perda dan peta KP2B dari DPUPR Kab Temanggung	2024
6	Sarana Informasi Interaktif Dinkominfo dan Layanan Publik Pemkab Temanggung RuDiMas (Ruang Digital Masyarakat)	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Penyediaan Ruang Podcast, pembentukan tim lintas sektoral	Memberikan informasi atau pengetahuan mengenai topik tertentu kepada masyarakat termasuk program pemerintah yang terstruktur, mengikuti trend dan perkembangan	Informasi tersampaikan ke masyarakat, dan dapat dipelajari melalui podcast yang disampaikan	2024
7	Layanan Lapran dan Aduan Masyarakat WAGE (Whatsapp Gateway)	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Menyusun Peraturan Bupati tentang Mean Time To Response (MTTR) Laporan dan Aduan, serta Reward and Punishmentnya.	Layanan aduan masyarakat melalui Whatsapp yang bisa diakses melalui website dan aplikasi whatsapp itu sendiri, dengan nomor 085878600900	penyebaran informasi program/kegiatan pemerintah kepada masyarakat dan aduan masyarakat kepada pemerintah bisa tersampaikan secara cepat.	2024
8	Diskusi Seputar Layanan Publik Pemkab	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Intervensi Teknologi informasi dengan pemanfaatan	Penyampaian program kerja pemerintah yang terstruktur, mengikuti trend	Masyarakat mendapatkan informasi layanan umum Pemkab Temanggung dan	2024

No	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
	Temanggung "RUBRIK DIGITAL"			google form/aplikasi sistematis lainnya dalam pengaturan tema, trend isu dan penjadwalan	dan perkembangan	dapat berdialog secara interaktif	
9	Analisis Media Sosial Kabupaten Temanggung	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Implementasi	Dokumen laporan bulanan Analisis Media Sosial	Pemerintah Kabupaten Temanggung mengetahui sentimen dan opini publik serta mengetahui engagement Instagram untuk masing-masing akun OPD	2023-sekarang
10	Sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) Pemerintah Desa dan Kelurahan melalui Sertifikat Elektronik BsRE	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Implementasi	Kepala Desa dan Lurah se Kab. Temanggung memiliki TTE	Layanan publik menjadi lebih efisien	2024-sekarang
11	Aplikasi Temandata	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Implementasi	Mengintegrasikan data-data statistik di Kabupaten Temanggung		2025-sekarang
12	Aplikasi Dasdes	Dinkominfo Kab. Temanggung	APBD	Implementasi	Terkontrolnya Transaksi Keuangan Pemerintah Desa		2025-sekarang

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 5 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinkominfo ada 17 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	KIP Award Peringkat IX Tahun 2021	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
2	Juara II Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng tahun 2021	Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
3	Dukungan kerjasama dan kontribusi dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2021	Bupati Temanggung	Kabupaten	Dinkominfo
4	Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2022	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
5	Penghargaan, ERTE FM Temanggung Jateng Terbaik I Kategori Radio Ramah Anak Tahun 2022	Persatuan Radio LPPL se-Indonesia (Persada)	Nasional	Dinkominfo
6	Anugrah Penyiaran Jawa tengah 2022, LPPL Radio ERTE FM Juara I Lembaga Penyiaran Publik Lokal Terbaik 2022	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID Prov Jateng)	Regional	Dinkominfo
7	KIP Award Peringkat VIII Tahun 2023	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
8	Juara I Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng tahun 2023	Dinkominfo Prop. Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
9	Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2023. Juara 3 (Temanggung TV)	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID Prov Jateng)	Regional	Dinkominfo
10	Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Regional	Dinkominfo

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
	2023. Juara 2 (Radio eRTe FM)	(KPID Prov Jateng)		
11	INDONESIA PERSADA.ID AWARD IV TAHUN 2023. Terbaik I	Persatuan Radio TV Publik Seluruh Indonesia	Nasional	Dinkominfo
12	Juara I Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2023	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID Prov Jateng)	Regional	Dinkominfo
13	Penghargaan sebagai Walidata Kabupaten Temanggung	BPS Kab. Temanggung	Kabupaten	Dinkominfo
14	KIP Award Peringkat Tahun 2024	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
15	Juara Harapan I Seleksi Pertunjukan Rakyat FK Metra Tingkat Prop. Jateng tahun 2024	Dinkominfo Prop. Jawa Tengah	Regional	Dinkominfo
16	Penghargaan Juara I sebagai LPPL Peduli Anak pada Anugrah Penyiaran Ramah Anak 2024	Komisi Penyiaran Indonesia	Nasional	Dinkominfo
17	Juara I Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2024	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID Prov Jateng)	Regional	Dinkominfo

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinkominfo Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinkominfo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung.

Perencanaan Program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Temanggung merujuk pada sasaran dan Kebijakan Kemkominfo untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Dalam Rancangan Rencana Strategis Kemkominfo 2025-2029 disebutkan bahwa dalam mendukung kebijakan nasional, Kemkominfo berfokus pada pengembangan dan penguatan infrastruktur digital, ekosistem digital, serta pengamanan ruang digital. Ini mencakup peningkatan konektivitas internet, pembangunan Pusat Data Nasional, dan peningkatan literasi digital. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Arah kebijakan Kemenkominfo antara lain:

1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital;
2. Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital;
3. Komunikasi Publik dan Media;
4. Dukungan Manajemen.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang

digital yang aman dan berdaulat. Adapun sasaran strategis nasional di bidang komunikasi dan informatika meliputi:

1. Peningkatan kualitas SPBE;
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Transformasi digital;
Mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan literasi digital;
Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara positif dan produktif.
4. Peningkatan kualitas infrastruktur TIK;
Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur TIK untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas layanan digital.
5. Peningkatan kecukupan informasi masyarakat;
Memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses, serta mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks.
6. Terwujudnya birokrasi layanan yang profesional;
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas.
7. Pengelolaan arus informasi yang baik;
Membangun ekosistem informasi yang sehat, bertanggung jawab, dan mendukung pembangunan nasional.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis ini diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang maju, sejahtera, dan berdaulat di era digital.

Pelaksana dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, baik ditingkat pusat, propinsi maupun kabupaten/kota

bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkominfo

Tujuan Dinkominfo yang dirumuskan dalam Renstra Dinkominfo 2025-2029 adalah *“Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi”*, yang berorientasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi (TI) memungkinkan otomatisasi proses administrasi, mempermudah akses informasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai atas tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinkominfo.

2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu;
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Sistem online, aplikasi, dan media sosial dapat digunakan untuk penyampaian informasi, pengisian formulir, dan pengaduan; dan
4. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran,
Program dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Satuan Target	Target Tahun 2026	Target Kondisi Akhir 2029
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks layanan SPBE	Program Aplikasi Informatika	Nilai	4,60	4,80
	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks tata kelola SPBE	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai	3,40	3,70
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1. Program Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai	96,50	98,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Satuan Target	Target Tahun 2026	Target Kondisi Akhir 2029
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai	82,3	85,3
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai	75,25	76,00

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut selanjutnya dijabarkan melalui program dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, dan Target Kinerja
Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target Tahun 2026	Target Kondisi Akhir 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks layanan SPBE	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik secara elektronik	Persen	75,00	100
	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks tata kelola SPBE	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik	Persen	37,68	100
				Persentase rumah tangga dengan akses internet	Persen	91,50	93,50
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	Nilai	300	380
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	Persen	85,75	86,75
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik		Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	Persen	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Satuan Target	Target Tahun 2026	Target Kondisi Akhir 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	Persen	100	100
				Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	Persen	17,50	25,00
				Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)	Nilai	50	70
				Ketersediaan data statistik sektoral	Persen	100	100
				Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	Nilai	82,3	85,3
				Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Nilai	75,25	76,00
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Nilai AKIP Perangkat Daerah					

Sumber: RPJMD Kab. Temanggung Tahun 2025-2030

Kebijakan dan strategi Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinkominfo Tahun 2025-2029 yang dalam penetapannya mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 terkait dengan urusan komunikasi dan informatika, termasuk didalamnya dalam urusan statistik dan persandian. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinkominfo Tahun 2025-2029.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Dinkominfo juga memiliki peran penting dalam menunjang program prioritas Bupati dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program yang berfokus pada pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi. Tugas ini mencakup berbagai aspek, yaitu pengembangan infrastruktur digital, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan data statistik hingga keamanan informasi.

Program prioritas Bupati yang menjadi tanggungjawab Dinkominfo adalah sebagai berikut:

1. Terintegrasinya seluruh layanan digital dalam *superapps*;
2. Tersedianya fitur layanan antarmuka yang mudah digunakan oleh publik;
3. Terbentuknya tim yang mengelola data dan informasi *superapps*;
4. Tersedianya jaringan internet (hotspot) gratis dilokasi publik strategis;
5. Tersedianya *bandwith* jaringan internet stabil dan cepat (min 300 Mbps);
6. Adanya pengaturan sistem penggunaan jaringan internet gratis untuk publik (no akses pornografi, judol, dan konten terlarang lainnya);
7. Tersedianya data jumlah masyarakat yang mengunduh aplikasi *superapps*;
8. Meningkatnya pemanfaatan *superapps* oleh masyarakat secara bertahap (tahun pertama 20%);
9. Adanya sosialisasi dan video tutorial sederhana yang memudahkan masyarakat menggunakan fitur penting dalam *superapps*;
10. Adanya diseminasi informasi pengaduan secara reguler kepada Bupati & OPD untuk perbaikan layanan;
11. Adanya pelaporan penanganan terhadap aduan oleh OPD yang disampaikan kepada tim.

Program dan kegiatan Dinkominfo Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinkominfo Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	1	2	3	4
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.467.284.180	I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.180.479.901	1.713.195.721
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.731.564.823	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.894.760.901	2.163.196.078
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.051.189.764	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.051.189.764	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.051.189.764		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.051.189.764	-
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	745.009.000	745.009.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	745.009.000	745.009.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.092.400	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.757.100	29.664.700
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.992.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.500	- 3.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.617.400		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.907.600	- 10.709.800
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.515.000	40.515.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.001.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	- 1000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.500.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.982.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.982.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.864.000	- 136.000

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	1	2	3	4
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.789.159	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.704.634.037	1.441.844.878
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	560.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	560.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.012.400		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.008.800	- 3.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	241.216.759		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.683.065.237	1.441.848.478
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.493.500	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.171.000	- 53.322.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.493.500		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.171.000	- 53.322.500
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	530.000.000	B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	505.000.000	- 25.000.000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	530.000.000	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	505.000.000	- 25.000.000
	Diseminasi Informasi	90.000.000		Diseminasi Informasi	65.000.000	- 25.000.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	440.000.000		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	440.000.000	-
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.205.719.357	C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.780.719.000	- 425.000.357

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	1	2	3	4
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	220.000.000	- 30.000.000
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	250.000.000		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	220.000.000	- 30.000.000
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.955.719.357	2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.560.719.000	- 395.000.357
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.535.719.357		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.480.119.000	- 55.600.357
	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	420.000.000		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	80.600.000	- 339.400.000
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	180.000.000	II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	30.000.000	-150.000.000
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	180.000.000	A	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	30.000.000	- 150.000.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	- 150.000.000
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	180.000.000		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	30.000.000	- 150.000.000
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	405.000.000	III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	334.999.600	- 70.000.400

RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			RANCANGAN RENJA DINKOMINFO TAHUN 2026			(+/-)
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	1	2	3	4
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	405.000.000	A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	334.999.600	- 70.000.400
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	334.999.600	- 70.000.400
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	350.000.000		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	300.000.000	- 50.000.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	55.000.000		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	34.999.600	- 20.000.400
	TOTAL	8.052.284.180		TOTAL	9.545.479.501	1.493.195.321

Sumber: SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp. 1.493.195.321,- dikarenakan ada penambahan anggaran yang bersumber dari dana DBHCHT yaitu sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang semula tidak dianggarkan pada Rancangan Awal Renja 2026, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk belanja tenaga kerja administrasi (gaji supporting staf) sebanyak 41 orang.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinkominfo Kab. Temanggung Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9.180.479.901					9.849.355.693
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6.894.760.901					7.348.695.693
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.051.189.764					4.253.749.252
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	40 orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai	4.051.189.764	DAU			100	4.253.749.252
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					745.009.000					782.259.450
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Temanggung	7000 orang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat	745.009.000	DBHC HT			100	782.259.450
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					230.757.100					258.101.450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	4 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.988.500	DAU			100	5.487.350
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	4 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tecukupinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai	60.907.600	DAU			100	71.617.400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	3 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tecukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga	50.515.000	DAU			100	55.566.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	6 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya alat tulis kantor dan tinta komputer	22.000.000	DAU			100	24.200.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy	9.500.000	DAU			100	10.450.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai	27.982.000	DAU			100	30.780.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	54.864.000	DAU			100	60.000.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.704.634.037					1.875.097.441
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat	560.000	DAU			100	616.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon	7.000.000	DAU			100	7.700.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	14.008.800	DAU			100	15.409.680
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Terbayarnya honorarium direktur utama LPPL TV Tmg dan eRTe FM, direktur penyiaran, manager LPPL, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan Dinkominfo sebanyak 41 orang dan upah lembur pegawai	1.683.065.237	DAU			100	1.851.371.761
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					163.171.000					179.488.100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Kab. Temanggung	26 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional,	163.171.000	DAU			100	179.488.100

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK						
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	505.000.000					490.000.000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Terwujudnya pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat dan terpercaya	505.000.000					490.000.000
	Diseminasi Informasi	Kab. Temanggung	20 Persen	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	1. Adanya sosialisasi dan video tutorial sederhana yang memudahkan masyarakat menggunakan fitur penting dalam superapps 2. Meningkatkan pemanfaatan superapps oleh masyarakat secara bertahap	65.000.000	DAU	Prioritas Bupati Rp. 65.000.000		100	71.500.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Temanggung	52 media	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1. Adanya diseminasi informasi program dan kegiatan Kepala Daerah, Perangkat Daerah serta kebijakan yang berdampak kepada masyarakat 2. Adanya layanan dan pengelolaan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat sebagai sarana perbaikan layanan publik	440.000.000	DAU	Prioritas Bupati Rp. 40.000.000		100	490.000.000
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.780.719.000					2.010.660.000
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup					220.000.000					242.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kab. Temanggung	2 dokumen (dok. penatalaksanaan dan pengawasan)	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1. Adanya pengaturan sistem penggunaan jaringan internet gratis untuk publik (no akses pornografi, judol, dan konten terlarang lainnya) 2. Terlaksananya pengelolaan domain/subdomain yang optimal dan efektif	220.000.000	DAU	Prioritas Bupati Rp. 220.000.000			242.000.000
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Meningkatnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.560.719.000					1.768.660.000
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	46 PD	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Tersedianya jaringan internet (hotspot) gratis dilokasi publik strategis secara bertahap (tahun pertama sekitar 3 lokasi strategis) 2. Tersedianya jaringan internet cepat ke OPD, Desa dan UPT	1.480.119.000	DAU	Prioritas Bupati Rp. 569.400.400			1.680.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Temanggung	3 dokumen (dok. Integrasi layanan SuperApps, dok. Upgrade Server, dok. Pengembangan Backend SuperApps)	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1. Terbangunnya aplikasi berbasis web (backend) dan aplikasi berbasis android Superapps. 2. Terintegrasinya seluruh layanan digital dalam superapps 3. Tersedianya fitur layanan antarmuka 4. Terbentuknya tim yang mengelola data dan informasi superapps 5. Tersedianya server yang handal untuk aplikasi superapps	80.600.000	DAU	Prioritas Bupati Rp. 86.600.000			88.660.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					30.000.000					190.000.000
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral	30.000.000					190.000.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Tersedianya Data Statistik Sektoral sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah	30.000.000					
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Temanggung	100%	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	1. Data jumlah masyarakat yang mengunduh superapps 2. Terselenggaranya SDI Kab. Temanggung yang menghasilkan data statistik sektoral yang mutakhir 3. Termutakhirnya data statistik sektoral pada Portal SDI dan Geoportal Kabupaten Temanggung	30.000.000	DAU	15.000.000			190.000.000
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					334.999.600					368.499.560
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	334.999.600					368.499.560
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Meningkatnya layanan pemerintahan digital yang memperhatikan prinsip SMKI	334.999.600					368.499.560
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	Kab. Temanggung	12 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan	Terwujudnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	300.000.000	DAU				330.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp.)		
			Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Target Capaian Kinerja				
								Tolok Ukur			Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	dengan peningkatan penilaian skor indek KAMI							
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kab. Temanggung	46 OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi pemerintah daerah dengan tersedianya TTE dan berita persandian menggunakan Aplikasi	34.999.600	DAU	Prioritas Bupati Rp. 9.999.600			38.499.560	
	TOTAL					9.545.479.501					10.407.855.253	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2026 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinkominfo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinkominfo Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinkominfo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinkominfo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinkominfo Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinkominfo Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinkominfo Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinkominfo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



[Signature]

GOTRA WIGANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- o TABEL RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL
- o POHON KINERJA
- o TABEL CASCADING KINERJA
- o CROSSCUTTING KINERJA
- o SK TIM PENYUSUN RENJA DINKOMINFO KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2026
- o RENCANA AKSI TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2026

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN OPERASIONAL

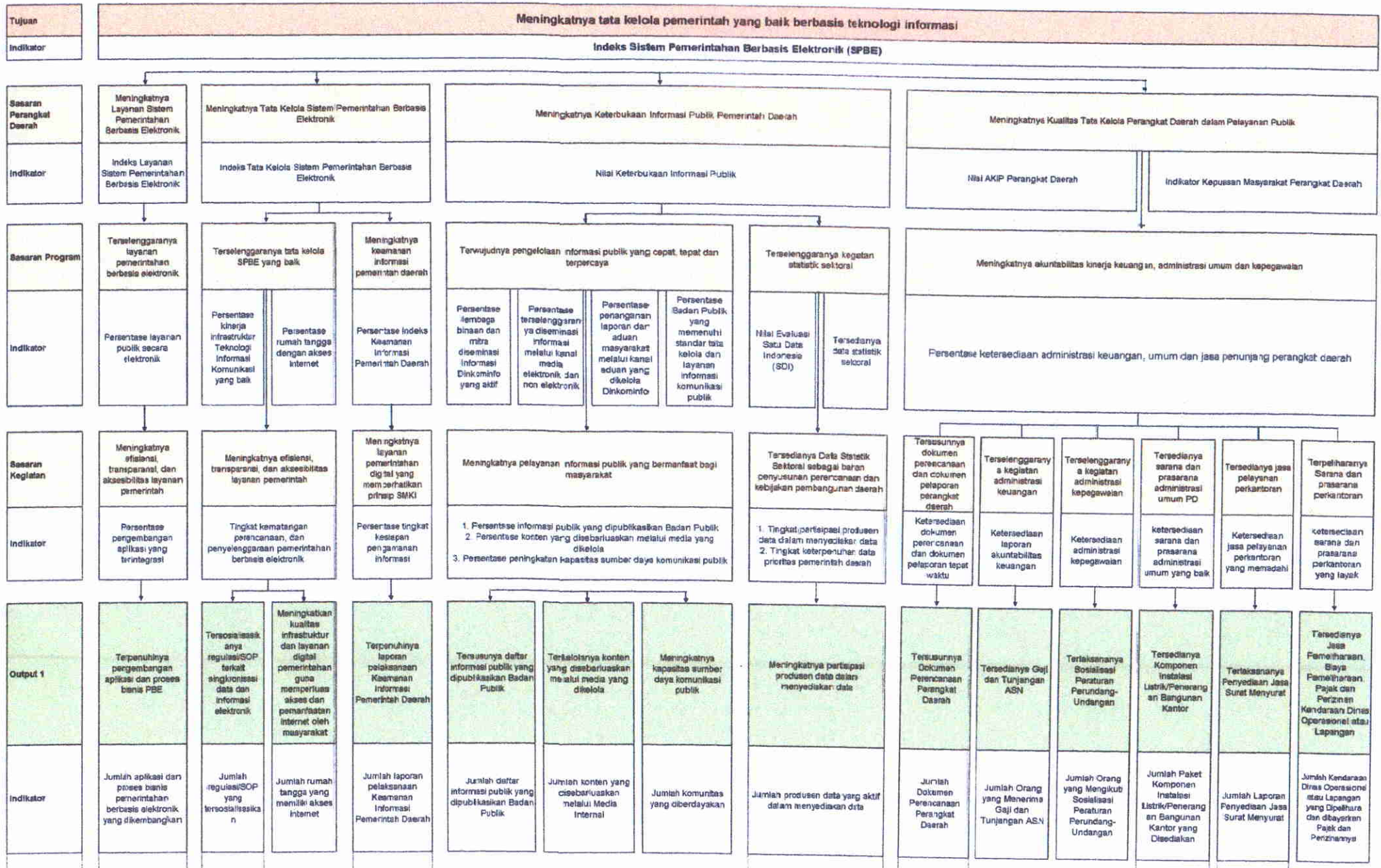
Nama Pemda	: Kabupaten Temanggung
Nama OPD	: Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi
Urusan Pemerintahan	: Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

[illegible]

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program Pd	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah										
				Nilai AKIP Perangkat Daerah										
			Terwujudnya pengelolaan dan layanan informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat dan valid	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Produksi konten dan sosialisasi tatap muka untuk peningkatan pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk dapat menerima dan memanfaatkan diseminasi informasi yang disampaikan	Risiko Operasional	Penyebarluasan informasi terkait program dan kegiatan perangkat daerah di pemerintah kab temanggung belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat	ROO. 25.16. 19.01	17	Belum optimalnya update informasi dari berbagai perangkat daerah kepada masyarakat	Tidak semua informasi publik tersampaikan kepada masyarakat	Monitoring dan Evaluasi secara berkala penyebaran dan diseminasi informasi oleh pengelola website dan dashboard resmi perangkat daerah	Kabid IKP Dinkominfo	Triwulan II Tahun 2026
			Terselenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Persentase layanan publik secara elektronik	Memfasilitasi pengajuan permohonan domain oleh OPD atau pemerintah desa. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis, permohonan diteruskan ke PANDI atau Kementerian Kominfo untuk registrasi. Domain yang sudah aktif dikelola dan dipantau secara berkala agar tetap digunakan sesuai ketentuan. Proses ini memastikan bahwa domain yang digunakan oleh perangkat daerah dan desa merupakan domain resmi pemerintah yang terstandar.	Risiko Operasional	Gangguan akses terhadap domain dan sub domain	ROO. 25.16. 19.06	17	Server down, IP diblokir, habis masa sewa	Domain dan sub domain tidak bisa diakses	Pengadaan genset untuk data center	Kabid TIK Dinkominfo	Triwulan III Tahun 2026

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program Pd	Proses Bisnis	Kategori Risiko	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			Terselenggaranya kegiatan keamanan informasi pada pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	Mengidentifikasi risiko keamanan informasi, penerapan standar keamanan serta penanganan insiden apabila terjadi kebocoran atau serangan siber. Proses ini bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah	Risiko Operasional	Sistem Informasi/Aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tidak berjalan	ROO. 25.21. 19.11	17	1. Serangan cyber 2. Gangguan teknis di Pusat Data	Terganggunya sistem informasi/aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Memprioritaskan VA pada aplikasi layanan publik yang vital	Kabid Statistik dan Persandian Dinkominfo	Triwulan III Tahun 2026

POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG



Output 2	Meningkatnya OPD yang mengimplementasikan inisiasi smart city sesuai masterplan smart city	Terpenuhiya kapasitas bandwidth jaringan intra pemerintah daerah	Terpenuhiya layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah	Terpenuhiya data prioritas pemerintah daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator	Jumlah OPD/instansi yang mengimplementasikan smart city sesuai masterplan smart city	Jumlah kapasitas bandwidth (Mbps)	Jumlah Perangkat Daerah telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	Jumlah data prioritas yang tersedia	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Output 3		Terkelolanya sarana prasarana data center				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator		Jumlah server yang berfungsi optimal				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Output 4						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Output 5						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	
Indikator						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
Output 6						Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	
Indikator						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	
Output 7						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Indikator						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



**TABEL CASCADING KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)									Nilai	3,75	3,8	3,85	3,9	4
		1. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							Nilai	3,75	3,80	3,90	3,95	4,00
				Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase layanan publik secara elektronik					Persen	4,6	4,7	4,75	4,8	4,9
						Meningkatnya pelayanan publik, memastikan akses informasi yang mudah, dan memperkuat identitas digital pemerintah daerah	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah domain/sub domain yang berfungsi optimal	Domain		455	467	475	490	510

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							Nilai	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
				Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik					Persen	3,2	3,4	3,6	3,7	4
					2. Persentase rumah tangga dengan akses internet					Persen	9,5	92	92,5	93	93,5
						Meningkatnya penerapan dan pemanfaatan sistem E-Government secara optimal di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
								Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah server yang berfungsi optimal	Server	25	25	25	25	25
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah PD yang tersambung jaringan intra pemerintah daerah melalui fiber optik	PD	46	46	46	46	46
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah layanan publik elektronik yang terintegrasi	Layanan	55	59	64	70	75
								Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah rumah tangga dengan akses internet	Rumah Tangga	160.000	186.000	212.000	225.000	240.000

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)					Nilai	300	320	340	360	380
						Terselenggaranya pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
								Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Keg	20	20	20	20	20
								Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah telah menggunakan layanan Keamanan Informasi	PD	46	46	46	46	46
				3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik					Nilai	96,5	97	97,5	98	98,5
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif			Persen	85,75	86	86,25	86,5	86,75

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2. Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik					Persen	100	100	100	100	100
					3. Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo					Persen	100	100	100	100	100
					4. Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik					Persen	17,5	20	22,5	25	27,5
						Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi komunikasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
							Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persen	20	22,5	25	27,5	30	
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persen	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	
							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah pelaku komunikasi publik yang meningkat wawasannya	Orang	500	600	700	800	900	

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2026	2027	2028	2029	2030			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI)					Nilai	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00			
					2. Ketersediaan data statistik sektoral					Persen	100	100	100	100	100			
						Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Temanggung	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
								Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	Persen	79,00	82,00	85,00	89,00	92,00			
								Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah produsen data yang aktif dalam menyediakan data	Produsen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
				4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM Perangkat Daerah								Nilai	82,30	83,30	84,30	85,30	86,30
					Nilai AKIP Perangkat Daerah								Nilai	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25
						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu						Persen	100	100	100	100	100
							2. Persentase Administrasi Kepegawaian, Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang						Persen	100	100	100	100	100

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40	40	40	40	40
						Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7000	7000	7000	7000	7000
						Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	6	6	6
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	3	4	5
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	4	5	4	3

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
											2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Berang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	12	12	12
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	12	12	12
						Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	12	12	12
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	12	12

Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	27	27	27	27

Temanggung, Juli 2025
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197712121987031006

CROSSCUTTING KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik berbasis teknologi informasi
Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Sasaran: Indeks Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator Sasaran: Indeks Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
Indikator Sasaran: Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik
Indikator Sasaran: > Nilai AKIP Perangkat Daerah > IKM Perangkat Daerah

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya layanan pemerintahan berbasis elektronik	Persentase layanan publik secara elektronik	- APJII - APTI - PANDI - Penyelis SSL - Semus PD

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terselenggaranya tata kelola SPBE yang baik	Persentase kinerja infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang baik Persentase desa yang menerapkan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital Persentase rumah tangga dengan akses internet	- APJII - APTI - PANDI - Penyelis SSL - Semus PD
Penyenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber di Pemerintah Daerah	Persentase Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	- BSSN - Semus PD

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting
Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Terwujudnya pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat dan terpercaya	Persentase lembaga bisnis dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik Persentase penanganan laporan dan aduan masyarakat melalui kanal sduan yang dikelola Dinkominfo Persentase Badan Publik yang memenuhi standar tata kelola dan layanan informasi komunikasi publik	- LIRL - RAPI - GARIR - PWI - PUJ - PDAM - BPS - KP/ Pratama - Telom - Pendes - BUILD - Poles - Kodm - Penyediaan Negri - Kemasag - BPI - PT - Seluruh PD
Penyenggaraan Statistik Sektoral	Terwujudnya tata kelola Satu Data Indonesia (SDI)	Nilai Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) Ketersediaan data statistik sektoral	- BPS - BIG - Bapenas - Seluruh PD

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Crosscutting
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	- Bappeda - DPPKPAD

Kegiatan :
1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :
1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jenderal Sudirman No.41-42 Temanggung 56216
Telepon (0293) 496 1389 Faximili 496 1995

Laman: www.kominfo.temanggungkab.go.id Pos-el : kominfo@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/25/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) 2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Dinas daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertugas menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 April 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOER WIJANTO WURIATMOJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 050/25/2025
TANGGAL: 22 APRIL 2025

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Gotri Wijianto Wuriatmojo, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penasehat
2	Adi Pitoko, S.Sos., M.M.	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Supriyati, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Andina Diah Rahayu, S.IP., M.Si.	Kabid Informasi Komunikasi Publik	Anggota
5	Hasan Darajat Pangudi, S.T	Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
6	Lisa Puspitasari, S.Sos	Kabid Statistik dan Persandian	Anggota
7	Eko Kus Prasetyo, ST, M.Eng	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
8	Ari Kurniawan, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
9	Alex Kusbiyanto, S.E.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
10	Handoyo, S.T. 197409152008011009	Sandiman Ahli Muda	Anggota
11	Musiron Abdul Dasir	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO

RENCANA KERJA TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KEGIATAN	RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN	PELAKSANAAN			KETERANGAN
			BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN	WAKTU	BUKTI FISIK	
1	Persiapan penyusunan	Penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja 2026	Rapat internal	Februari 2025	SK Tim Penyusun Renja	
		Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja	Rapat internal	Februari 2025	Rencana Aksi Tim Penyusun Renja	
		Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Data Pokok triwulan 4 tahun 2024)	Data pokok perencanaan pembangunan Triwulan-4 tahun 2024, Lap. Capain IKPD 2024, dan Laporan evaluasi renja 2024	Februari 2025	Dokumen Perencanaan	
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2026	Penyusunan rancangan awal Renja sesuai pagu indikatif yang diterbitkan Bapeda	Penyusunan matrik pagu indikatif ranwal renja 2026	Februari 2025	Matrik Ranwal Renja 2024	
		Penyusunan Kerangka Logis Kegiatan	Penyusunan Kerangka Logis Kegiatan oleh masing-masing bidang	Februari 2025	Dokumen Kerangka Logis Kegiatan	

NO	KEGIATAN	RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN	PELAKSANAAN			KETERANGAN
			BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN	WAKTU	BUKTI FISIK	
3	Pelaksanaan Forum Internal Perangkat daerah	- Analisis gambaran pelayanan - Analisis permasalahan - Penelaahan dokumen perencanaan lainya - Analisis isu strategis - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan	Rapat koordinasi	Februari 2025	Dokumen Hasil analisis	
4	Penyusunan Rancangan Renja 2023	Menyusun/menyempurnakan rancangan awal renja berdasarkan edaran pagu indikatif RKPD Bapeda	Matrik Rancangan Renja 2024	Februari 2025	Matrik Rancangan Renja 2026	
		Verifikasi Rancangan Renja oleh Kepala PD		Februari 2025		
		Desk Rancangan Awal Renja oleh tim verifikator Bapeda		Februari 2025	BA Hasil Desk Bapeda	
5	Forum Perangkat Daerah	Paparan Rancangan Renja 2026 oleh Kepala Dinas	Rapat Tekhnis	Februari 2025		
6	Input SIPD	Input pagu indikatif awal		Maret 2025	Hasil input aplikasi SIPD	
7	Perumusan Rancangan Akhir	Penyempurnaan Rancangan Renja berdasarkan pagu RKPD		Mei 2025	Dokumen Rancangan Renja	
		Penyusunan Pra RKA per sub kegiatan	Penyusunan pra RKA oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan	Mei 2025	Dokumen RKA	

NO	KEGIATAN	RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN	PELAKSANAAN			KETERANGAN
			BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN	WAKTU	BUKTI FISIK	
		Desk Rancangan Renja oleh tim verifikator Bapeda		Mei 2025	BA Hasil Desk Bapeda	
		Menyempurnakan Rancangan Renja sesuai BA hasil Desk		Mei 2025	Dokumen	
		Reviu Rancangan Renja oleh Tim Inspektorat		Mei 2025	Lembar reviu	
		Menyempurnakan Rancangan Renja sesuai hasil reviu Inspektorat		Juni 2025	Dokumen penyempurnaan renja	
8	Penetapan Renja 2026	Penetapan Renja 2026 dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah		Juni 2025	Surat Keputusan Kepala Dinas	
		Pengesahan dokumen Rencana Kerja 2026 oleh Kepala Bapeda	Lembar pengesahan dokumen	Juli 2025	Dokumen Lembar Pengesahan	
		Penggandaan dan penjilidan dokumen Renja 2026		Juli 2025	Dokumen Renja 2026	

Temanggung, Februari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG



GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197712121997031006